



BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ECONOMIC AND TAXATION OUTLOOK 2022

Febrio N. Kacaribu
Kepala Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan RI

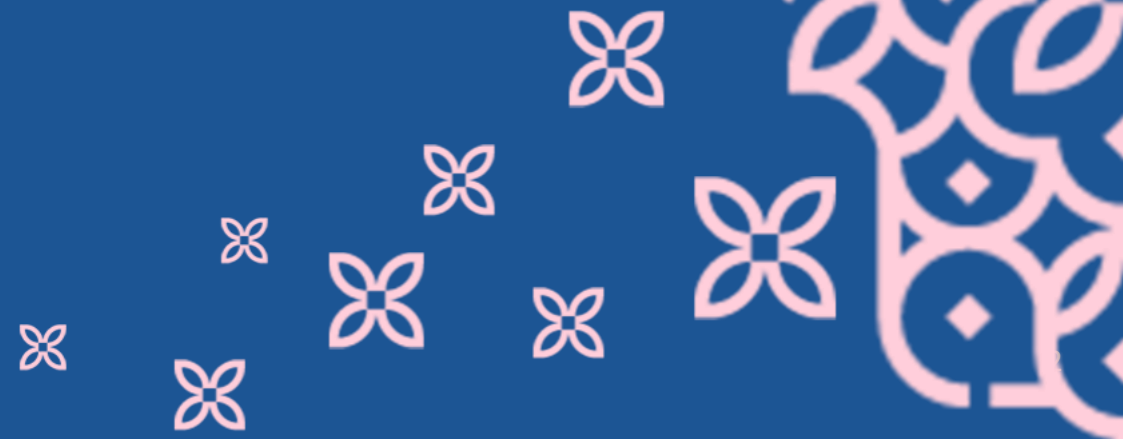
KAPj IAI Goes to Campus

Jakarta, 26 Januari 2022



1

DINAMIKA PEREKONOMIAN TERKINI





PANDEMI COVID-19 MASIH MENJADI TANTANGAN BAGI DUNIA

kenaikan kasus terjadi di berbagai negara sejak kehadiran varian Omicron

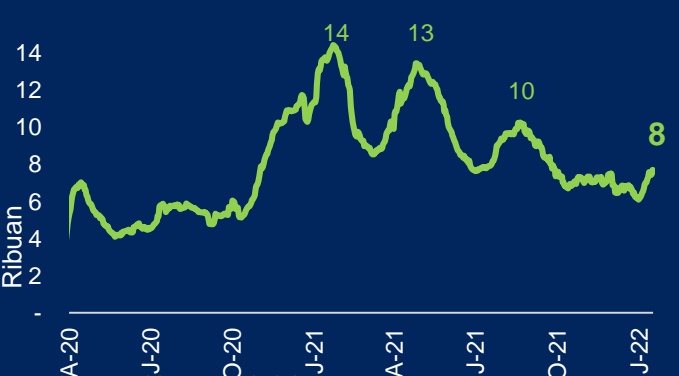
COVID-19 GLOBAL (24 Januari)

Total kasus = 355,44 juta
Total kematian = 5,62 juta
Vaksinasi = 9,94 miliar dosis (52,0% populasi)

KASUS HARIAN DUNIA (7dma)

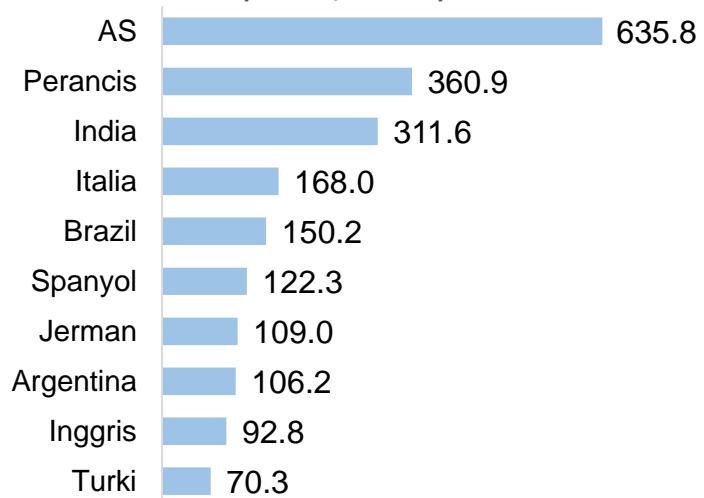


KEMATIAN HARIAN DUNIA (7dma)



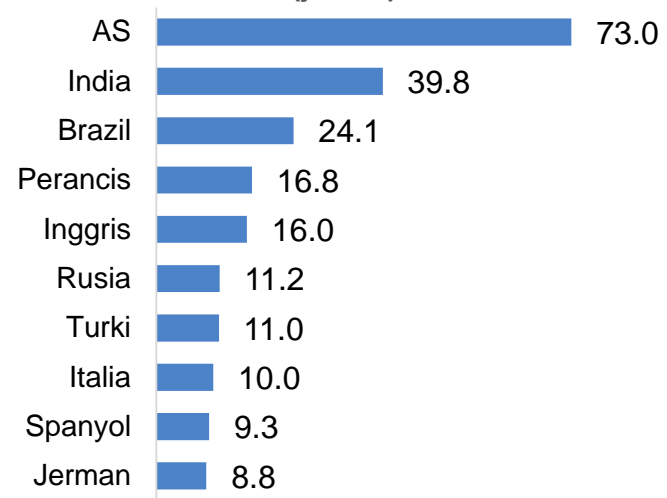
Sumber: Worldometer, diolah

Kasus Harian Berdasarkan Negara (7DMA, ribuan)



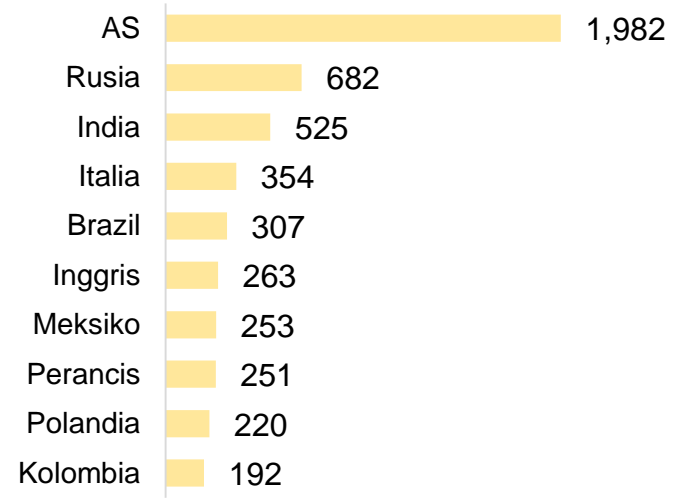
Kasus harian Indonesia 7DMA 2.104 kasus

Kasus Kumulatif Berdasarkan Negara (jutaan)



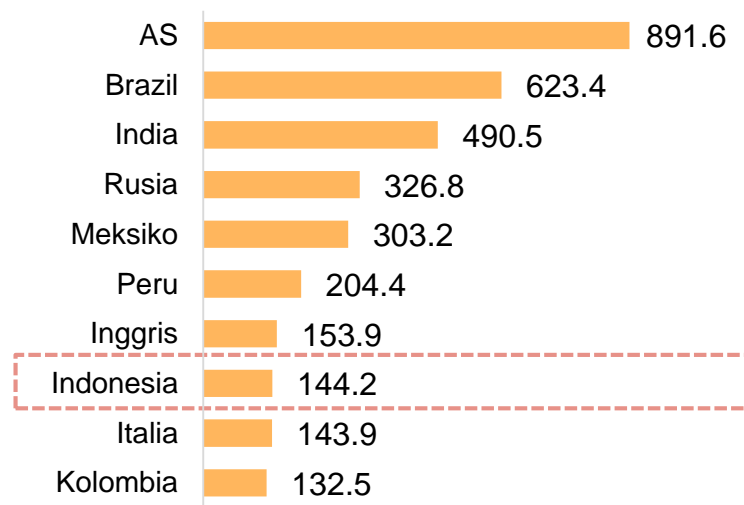
Kasus kum. Indonesia 4,29 juta (1,6% pop), peringkat 153 dari 222 negara

Kematian Harian Berdasarkan Negara (7DMA)



Kematian harian Indonesia 7DMA 7 kasus

Kematian Kumulatif Berdasarkan Negara (ribuan)



Indonesia peringkat 119 dari 222 negara

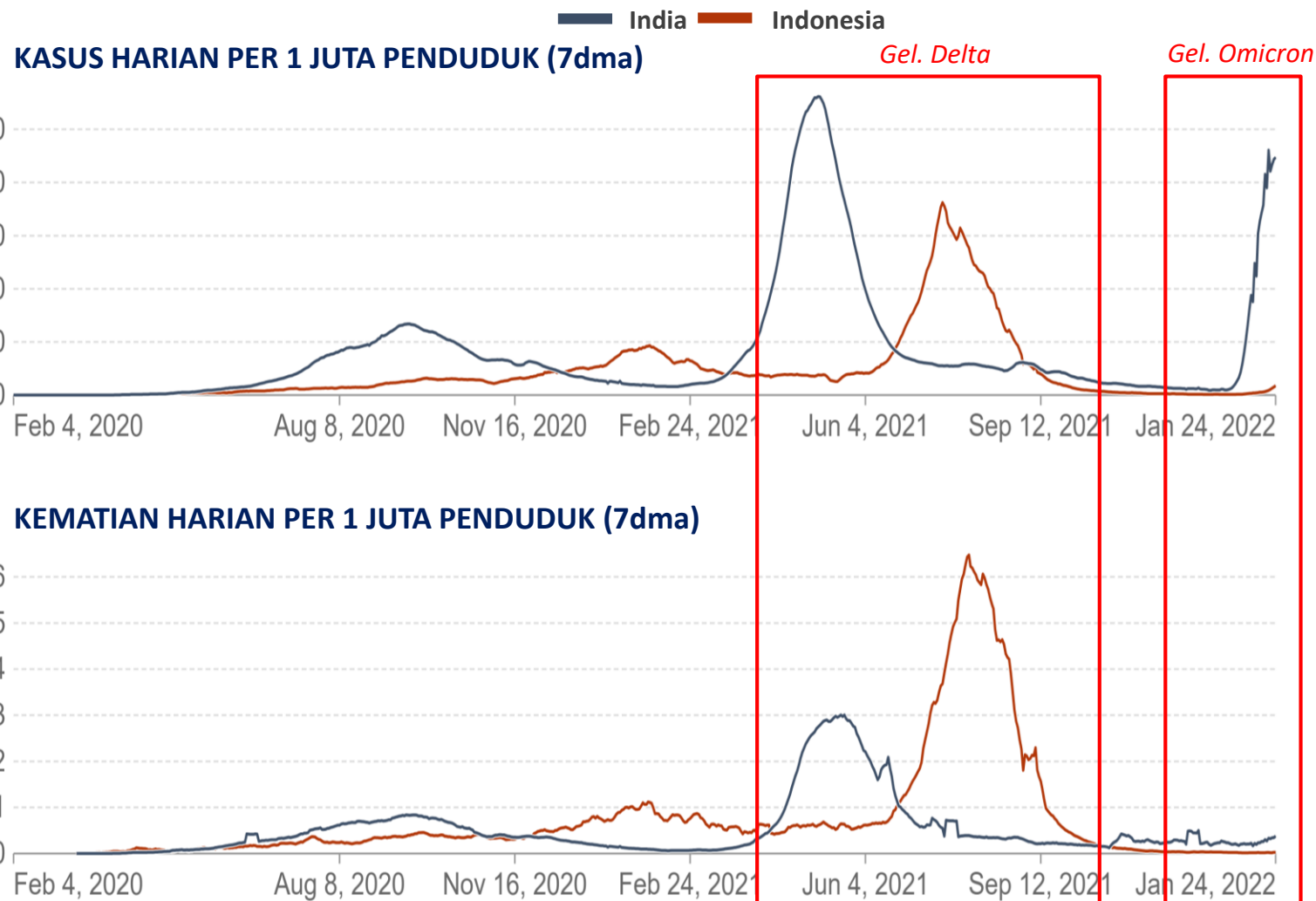
% populasi
22,0
2,9
11,4
24,9
23,5
7,7
13,1
16,5
19,9
10,5

% populasi
0,27
0,29
0,04
0,22
0,24
0,62
0,23
0,05
0,24
0,16



LONJAKAN KASUS COVID-19 OMICRON DI INDIA TIDAK DIKUTI KENAIKAN KEMATIAN

Pola gelombang pandemi India saat eskalasi Delta relatif mirip dengan Indonesia sehingga dapat menjadi referensi



Gelombang kasus Covid-19 Indonesia mirip dengan India, hanya ada *time lag*, seperti yang terjadi pada periode Delta.

Saat ini kasus harian Covid-19 India meningkat ke level $\frac{1}{2}$ kali dari gel. Delta, 1,5 bulan sejak Omicron teridentifikasi.

Meski demikian, tingkat kematian di India masih landai dan tidak terjadi lonjakan



PANDEMI COVID-19 INDONESIA MASIH TERKENDALI, NAMUN HARUS TETAP WASPADA



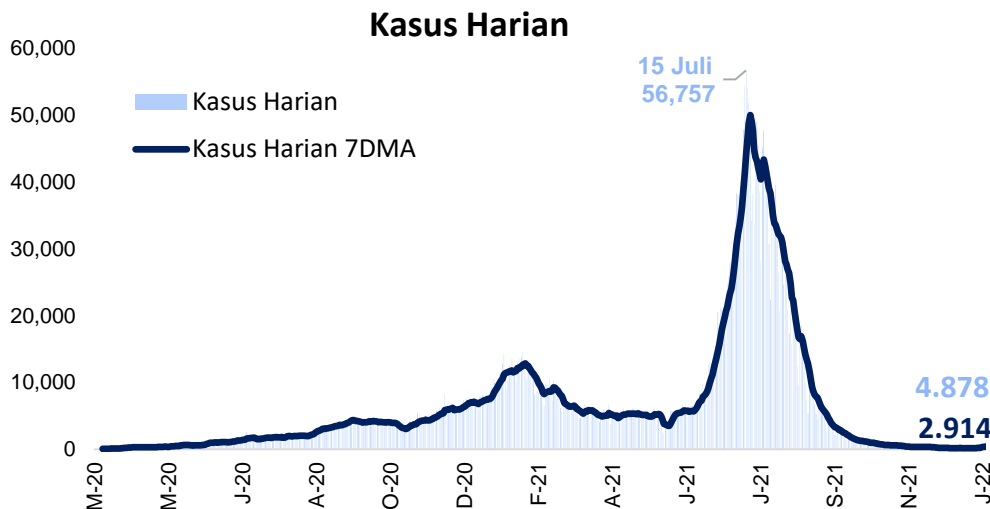
11 November 2021: sampel pertama diambil di Botswana dan kemudian terkonfirmasi sebagai B.1.1529.

24 November 2021: varian B.1.1.529 pertama kalinya dilaporkan oleh Afrika Selatan.

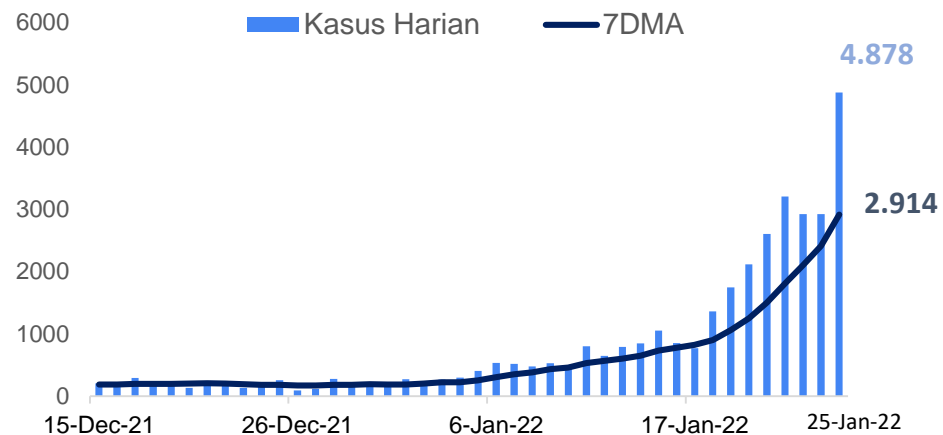
26 November 2021: WHO menyatakan B.1.1.529 sebagai *Variant of Concern* dan menyebutnya sebagai **Omicron**.

15 Desember 2021: Indonesia mengonfirmasi kasus pertama Omicron

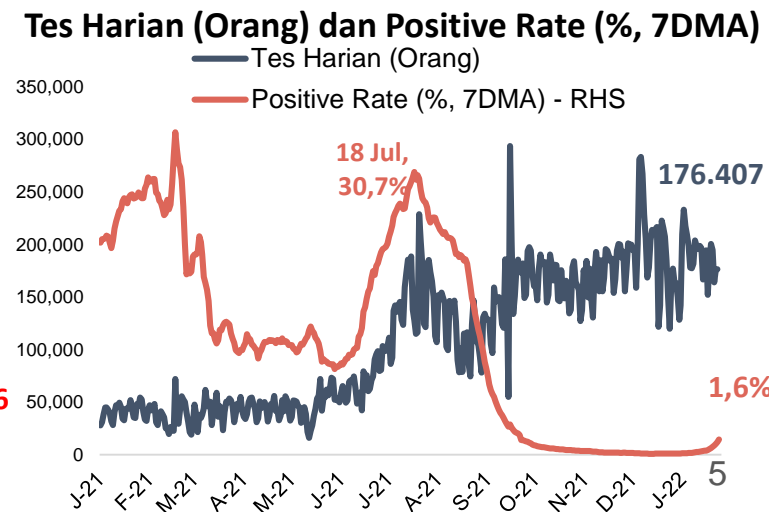
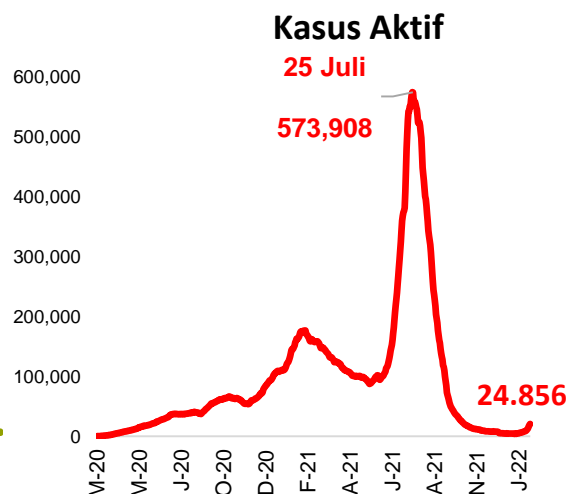
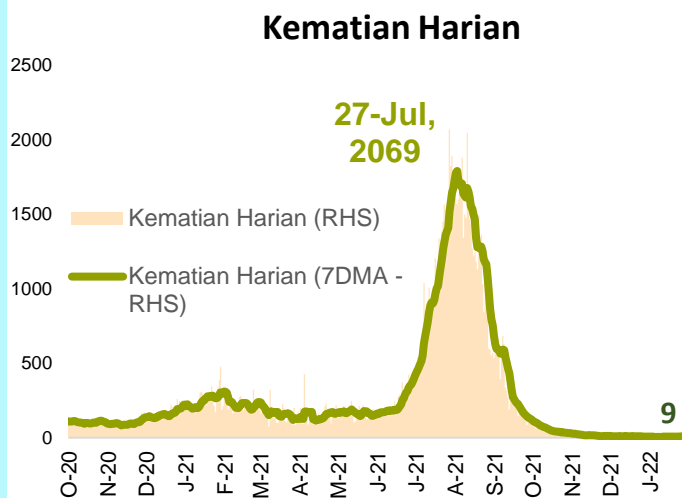
KASUS HARIAN AKIBAT COVID-19 (PER 23 JANUARI 2022)



Kasus Harian Sejak Omicron Masuk ke Indonesia



KEMATIAN HARIAN, KASUS AKTIF, DAN POSITIVE RATE COVID-19 (23 JANUARI 2022)



Sumber: Kemenkes, 23 Januari 2022



VAKSINASI MENJADI KUNCI TRANSISI *LIVING WITH ENDEMIC*

Harus terus diakselerasi sebagai salah satu langkah utama dalam mengendalikan pandemi Covid-19

Vaksinasi COVID-19 Kumulatif Beberapa Negara (Juta Dosis)

Per 25 Januari 2022



Vaksinasi Global

9,94 milyar dosis

184 negara

34,2 juta dosis per hari

52,0% populasi

"If we are to end the pandemic in the coming year, we must end inequity, by ensuring 70% of the population of every country is vaccinated by the middle of next year."

(WHO Director General Tedros A. Ghebreyesus, December 2021)

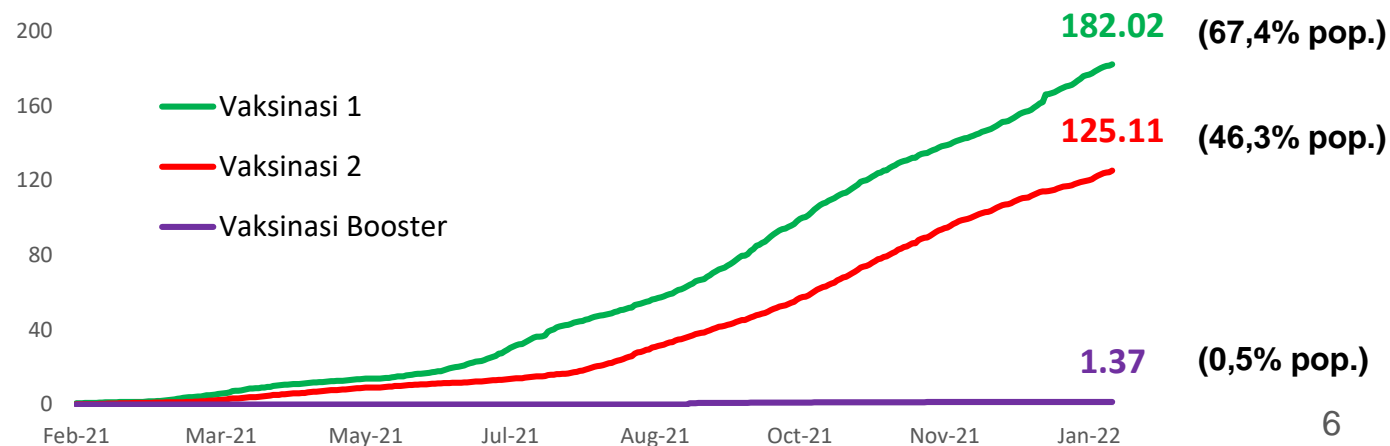
Vaksinasi Harian Indonesia (Dosis)

Per 25 Januari 2022



Realisasi Kumulatif Vaksinasi ke-1 dan ke-2 dan *booster* Nakes (Juta Dosis)

Per 25 Januari 2022



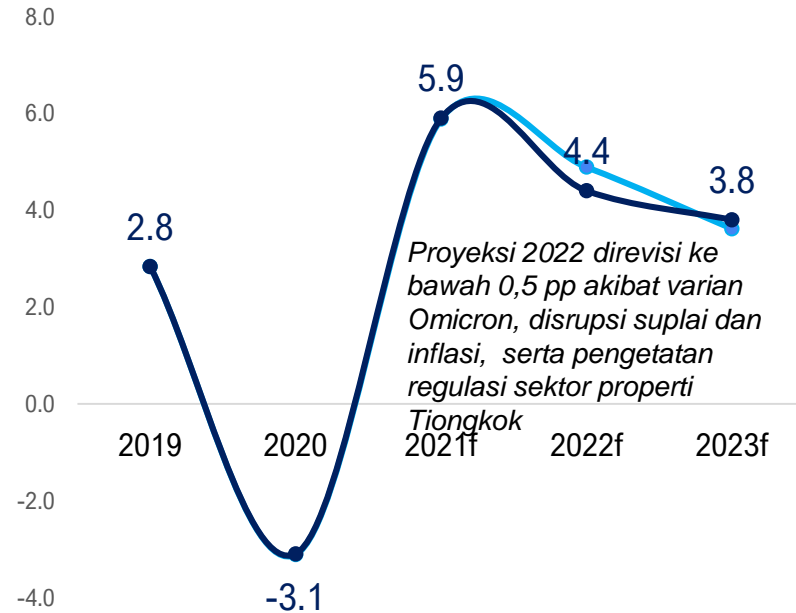


KINERJA PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL MENGALAMI MODERASI

Menurunnya dukungan kebijakan stimulus akan menyebabkan moderasi kinerja pertumbuhan ekonomi global

Proyeksi Pert. Ekonomi (% , yoy)

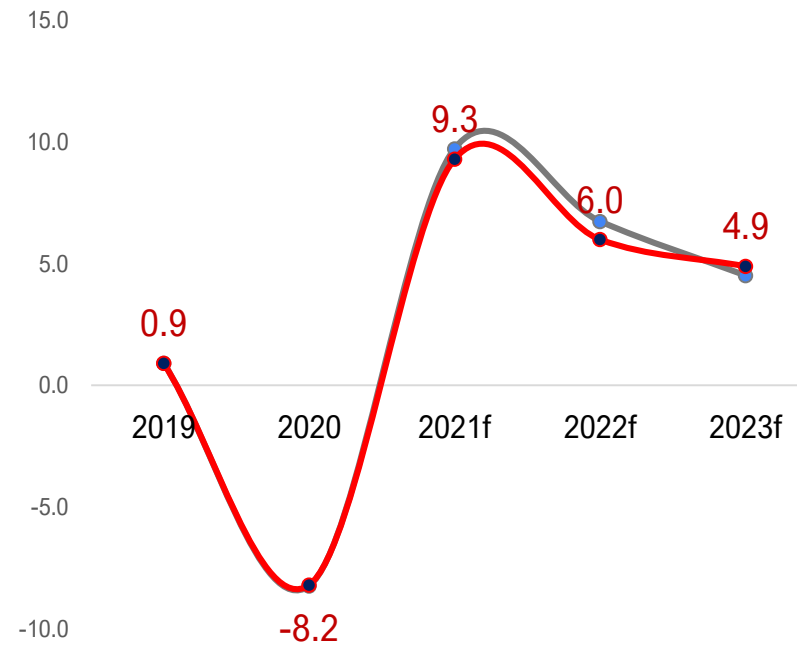
WEO Oct 2021 WEO Jan 2022



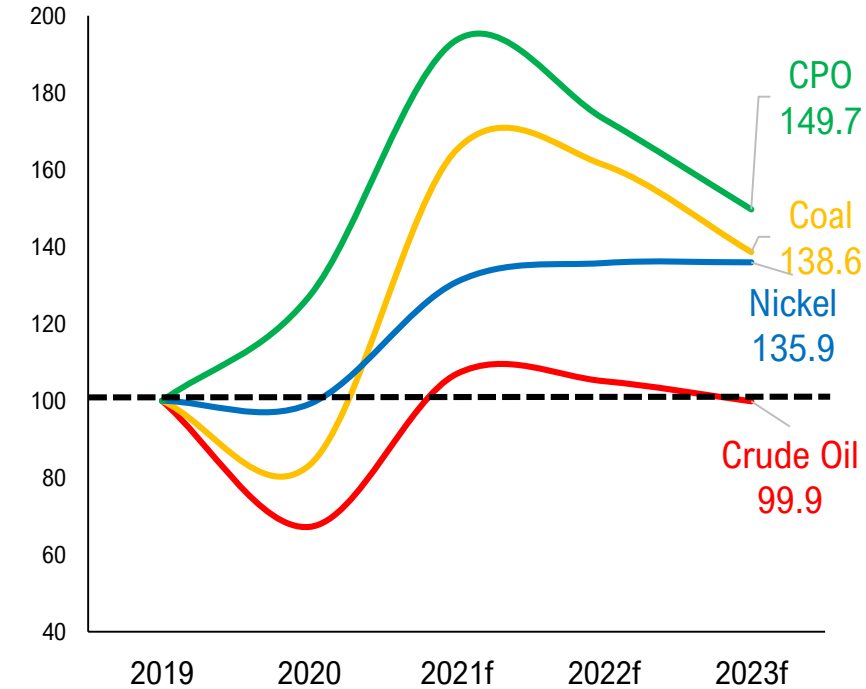
Sumber: WEO IMF Jan 2022 dan WEO Oct 2021, diolah

Proyeksi Pert. Vol Perdagangan (% , yoy)

WEO Oct 2021 WEO Jan 2022



Harga Komoditas Global (2010=100)



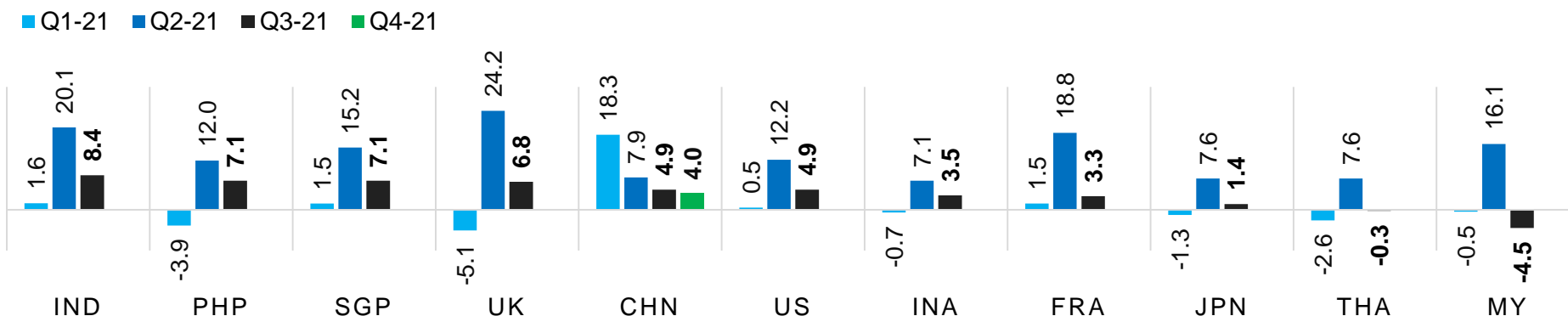
- **Pertumbuhan ekonomi global di 2023 diperkirakan mengalami moderasi seiring berkurangnya stimulus**, namun berada di atas level pre-pandemi. Terkendalanya pandemi dan pemerataan vaksin menjadi kunci utama pemulihan global ke depan.
- **Laju pertumbuhan volume perdagangan dunia melambat sejalan dengan moderasi kinerja pertumbuhan global.**
- **Harga komoditas mengalami moderasi**, namun demikian harga beberapa komoditas Indonesia masih berada di atas level pra-pandemi



PERTUMBUHAN SEJUMLAH NEGARA MELAMBAT DI Q3-2021 AKIBAT VARIAN DELTA

Tren di Q4-2021 diperkirakan bergantung situasi pandemi dan restriksi mobilitas

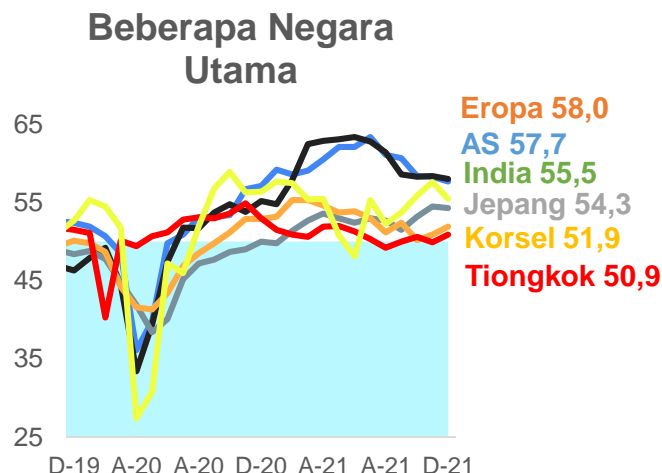
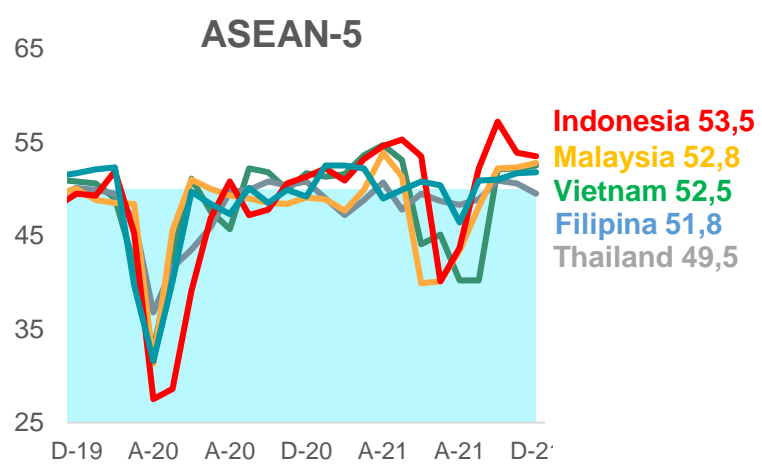
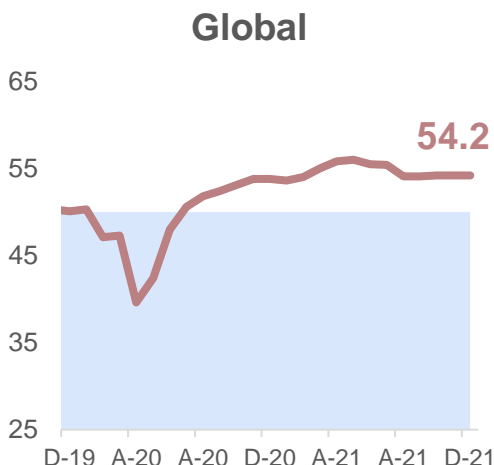
PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA (% yoy)



Sumber: Bloomberg

- Pertumbuhan ekonomi berbagai negara di Q3-2021 menunjukkan perlambatan akibat *high base* Q2 dan adanya faktor gelombang varian Delta.
- Pertumbuhan beberapa negara diperkirakan menguat di Q4, spt AS, Indonesia, Thailand dan Malaysia

PMI MANUFAKTUR PER DESEMBER 2021



- PMI Manufaktur Global pada Desember 2021 tercatat ekspansif di tingkat 54,2, didukung kenaikan tingkat permintaan, output, dan tenaga kerja.
- Kinerja PMI Manufaktur Indonesia di beberapa bulan terakhir berada di atas rata-rata ASEAN-5

Sumber: Bloomberg, IHS Markit, Kemenkeu

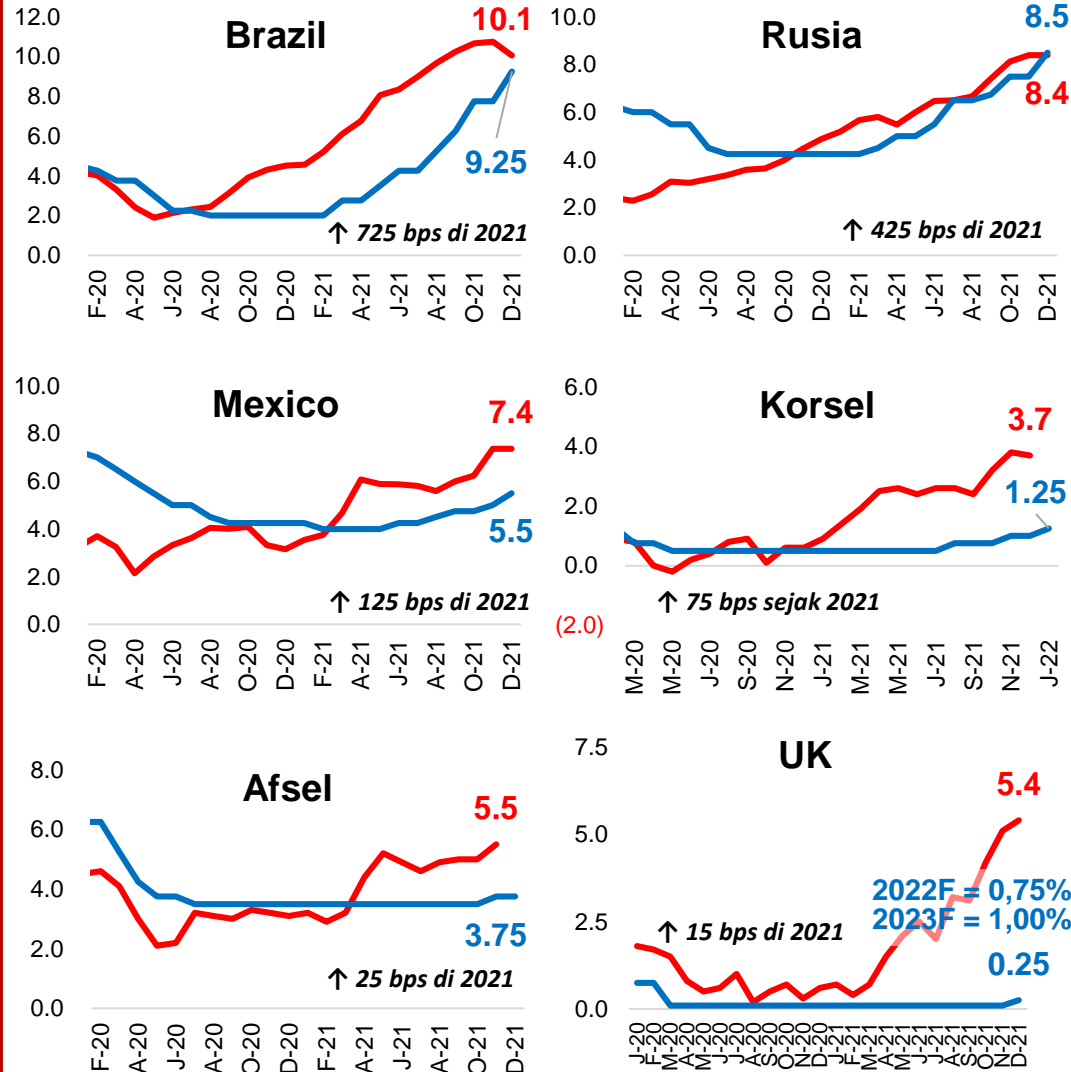


SUKU BUNGA MENINGKAT MERESPON TEKANAN INFLASI

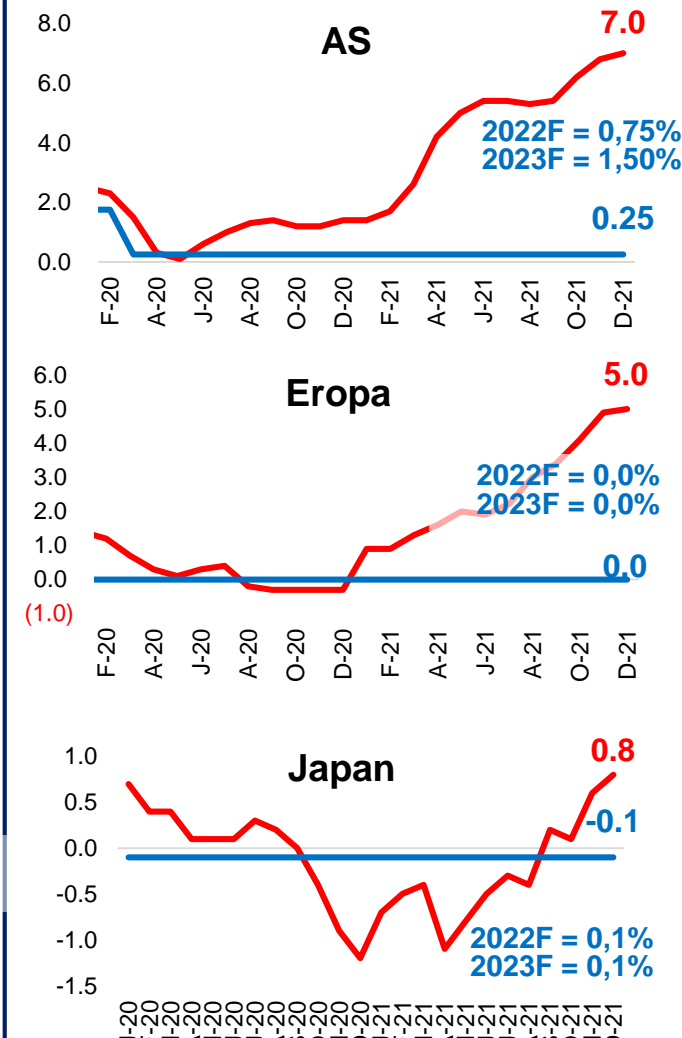
Terdapat potensi kebijakan moneter yang lebih ketat di tahun 2022 khususnya di negara maju

Inflasi (% yoy) Tingkat suku bunga acuan (%)

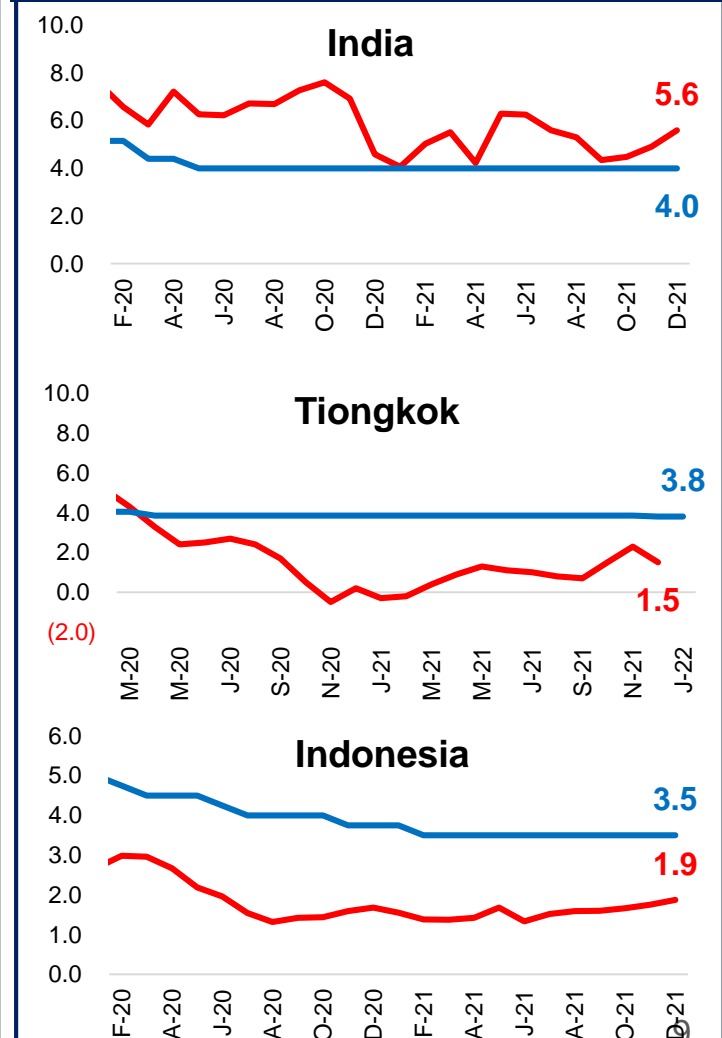
Beberapa negara G20 sudah meningkatkan suku bunga acuan



Negara Maju G20 yang masih mempertahankan suku bunga



Negara Berkembang G20 yang masih mempertahankan/menurunkan suku bunga





BERBAGAI DINAMIKA GLOBAL AKAN TERUS DIWASPADAI

Tantangan global jangka pendek dan panjang harus diantisipasi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan Indonesia

RISIKO PEREKONOMIAN DUNIA TERKINI

US TAPERING OFF

Tekanan inflasi tinggi

Percepatan *tapering* & potensi kenaikan suku bunga

TAPERING OFF DI EU & UK

Tekanan inflasi tinggi, *Tapering* oleh ECB dan BOE

Labor shortages

CHINA SWITCHING POLICY

Menuju pertumbuhan berkualitas

Menuju ke Green Economy

SUPPLY DISRUPTION & POTENSI STAGFLASI

Kenaikan Harga Komoditas Energi (akibat krisis energi Tiongkok dan winter)

Kelangkaan Input, Kenaikan Upah & Biaya Shipping

Naiknya ongkos produksi & Risiko Stagflasi

RISIKO-RISIKO LAINNYA

Keberlanjutan Pandemi Covid-19

Scarring effect

Tensi Geopolitik

Debt Sustainability in EMs

Climate Change

POTENSI TRANSMISI DAMPAK

Peningkatan volatilitas pasar keuangan

- Risiko *capital outflow* ke *safe haven asset*
- Penguatan Dollar AS
- Depresiasi mata uang EM termasuk Rupiah
- Kenaikan imbal hasil termasuk SBN
- Penurunan harga saham

Perlambatan pertumbuhan global

- Terganggunya supply chain di dalam negeri, berdampak pada sektor manufaktur
- Perlambatan pertumbuhan global, khususnya AS & Tiongkok,
- Penurunan permintaan terhadap barang ekspor mitra dagang kedua negara

Potensi inflasi impor

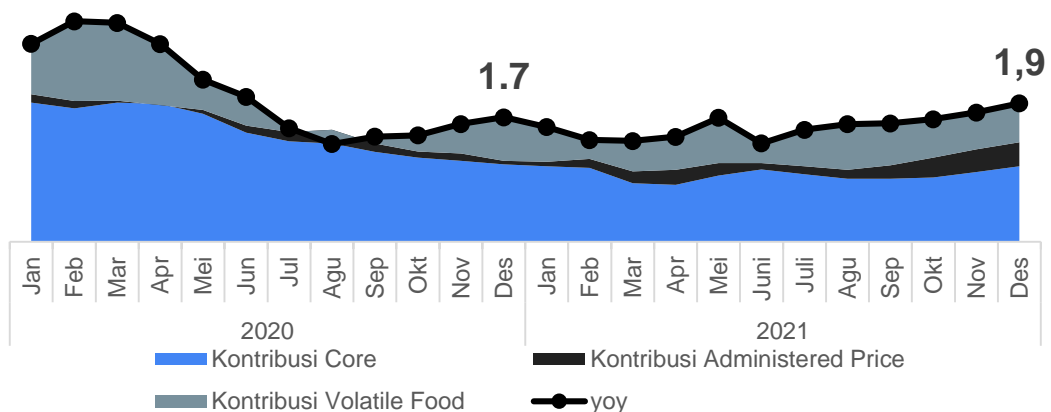
- Kenaikan harga komoditas energi dan pangan berpotensi mendorong inflasi dan subsidi
- Naiknya biaya input (terutama yang masih harus diimpor)
- Kenaikan *producer price* → kenaikan biaya impor



INFLASI DOMESTIK MASIH RELATIF TERJAGA

Laju inflasi IHK mulai menunjukkan tren meningkat, perlu diwaspadai transmisi imported inflation akibat tingginya tekanan harga global.

PERKEMBANGAN INFLASI 2021 (yoy)

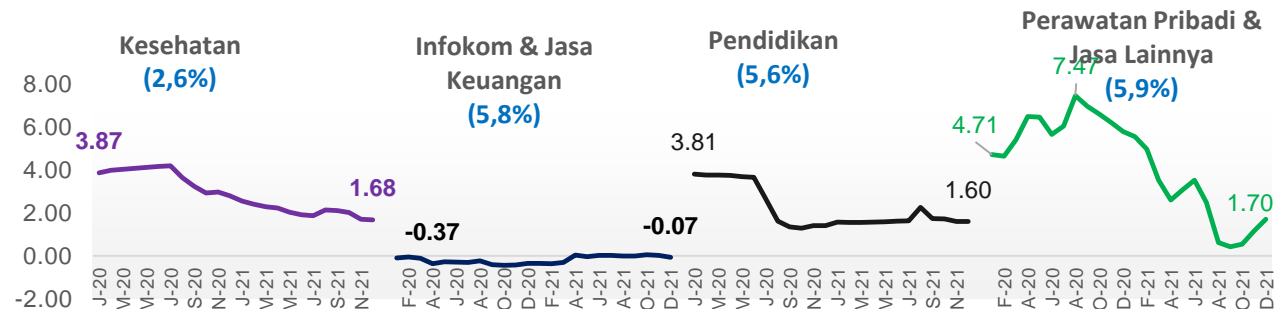
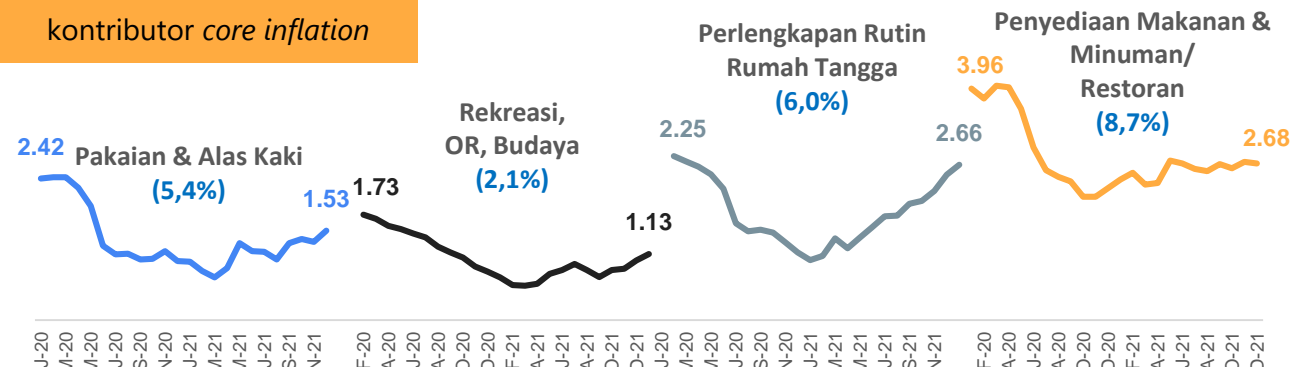


Sumber: BPS, diolah

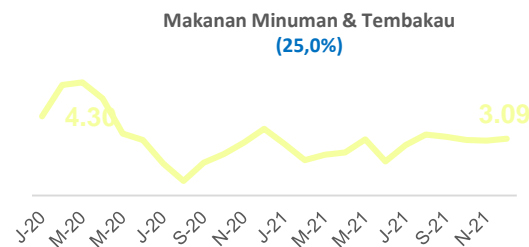
- ✓ Inflasi inti mulai mengalami peningkatan seiring pemulihan sisi permintaan.
- ✓ Perlu diwaspadai potensi transmisi kenaikan ongkos produksi dan distribusi (*pass through effect*) dan transmisi inflasi terimpor.

INFLASI KELOMPOK PENGELUARAN

kontributor core inflation

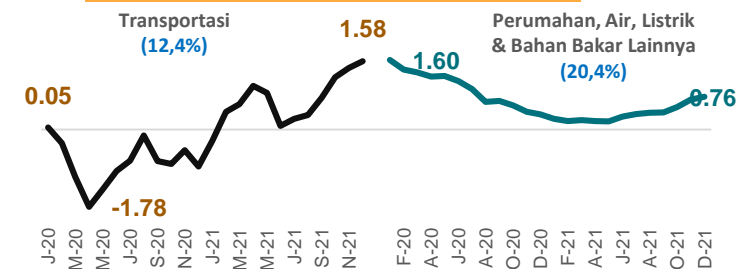


kontributor volatile food



Sumber: BPS, diolah

kontributor administered price

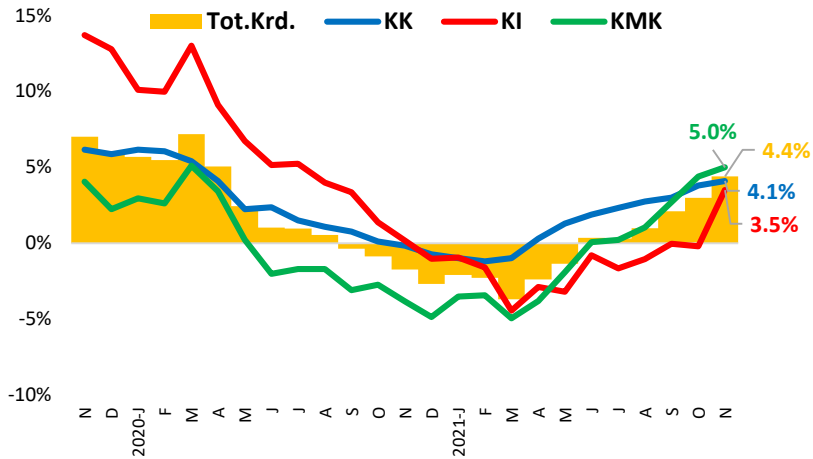




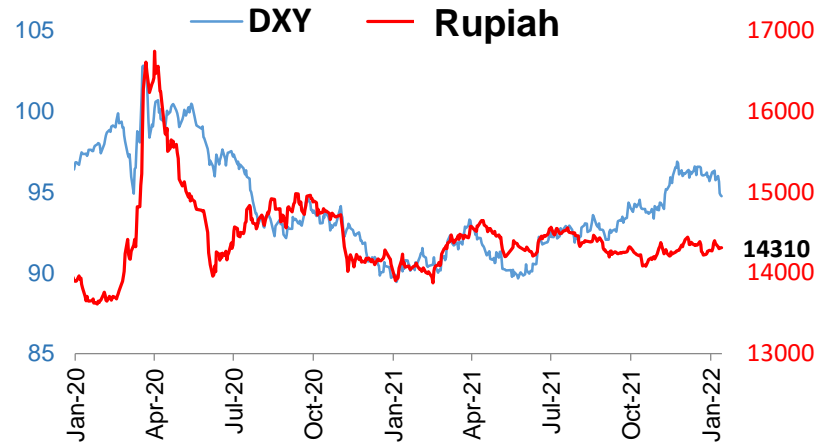
PASAR KEUANGAN DOMESTIK RELATIF TERJAGA DI TENGAH SENTIMEN GLOBAL

Ditopang kondisi fundamental ekonomi yang terus membaik & momentum pemulihan yang terus terjaga

Perkembangan Kredit Perbankan

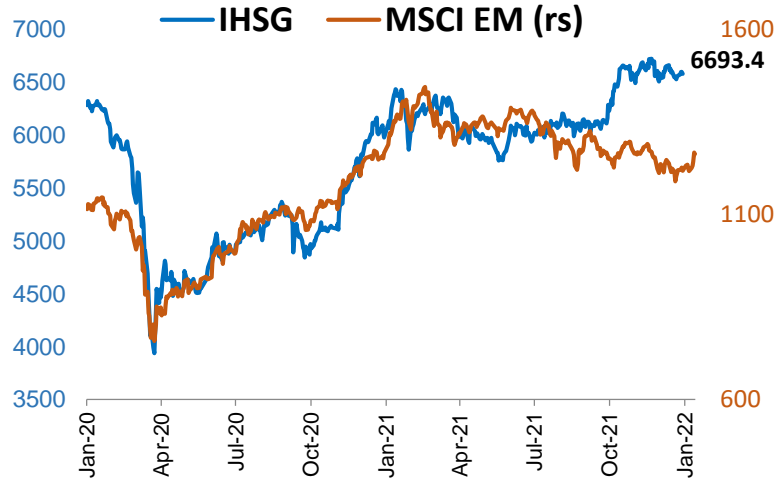


Pergerakan Nilai Tukar Rupiah (14 Jan'22)

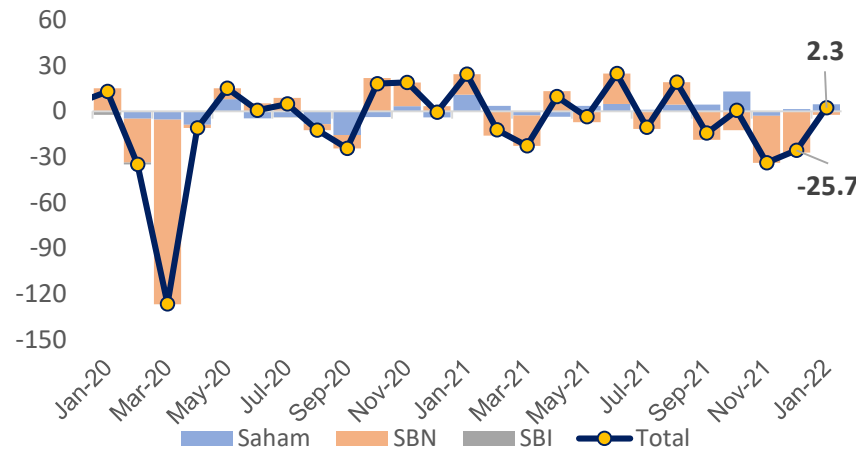


- Kredit Perbankan mulai mengalami peningkatan untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
- Volatilitas pasar keuangan global relatif stabil juga tercermin pada stabilnya nilai tukar rupiah dan pergerakan IHSG.

Perkembangan Indeks Saham (14 Jan'22)



Perubahan Pergerakan Aliran Modal (Rp. T)





KINERJA EKSPOR DI 2021 SANGAT KUAT

Neraca perdagangan mencatatkan surplus dalam 20 bulan berturut-turut (mencapai USD35.34 miliar pada 2021)

Ekspor Indonesia

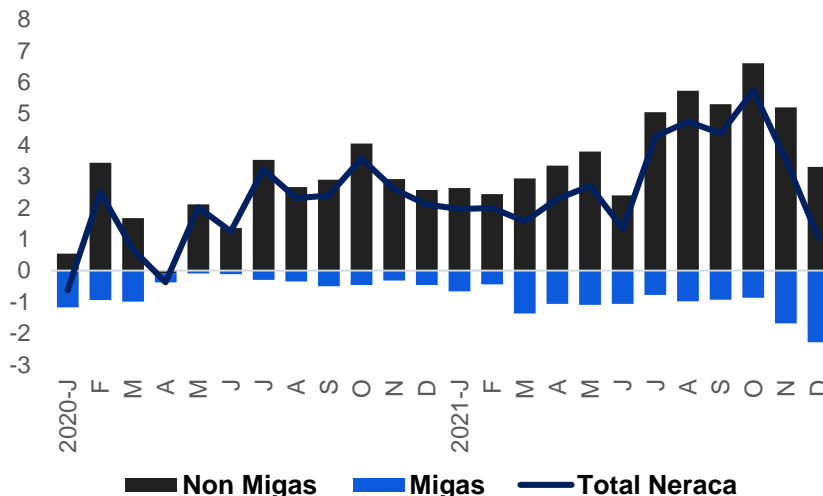


- **Ekspor selalu tumbuh *double digit***, didukung oleh kenaikan ekspor nonmigas unggulan. Di Des'21 Ekspor mencapai USD22.38 miliar, meningkat sebesar 35,30% (yoy).
- **Impor tumbuh tinggi mendukung tren pemulihan ekonomi domestik** dengan didominasi bahan baku & barang modal. Di bulan Des'21 impro mencapai USD21.36 miliar tumbuh 47.93% (yoy).

Impor Indonesia



Neraca Perdagangan (miliar USD)



Neraca Perdagangan Desember 2021

Miliar USD	Des-21	Nov-21
Total	1,02	3,52
Migas	-2,29	-1,69
Non Migas	3,30	5,21

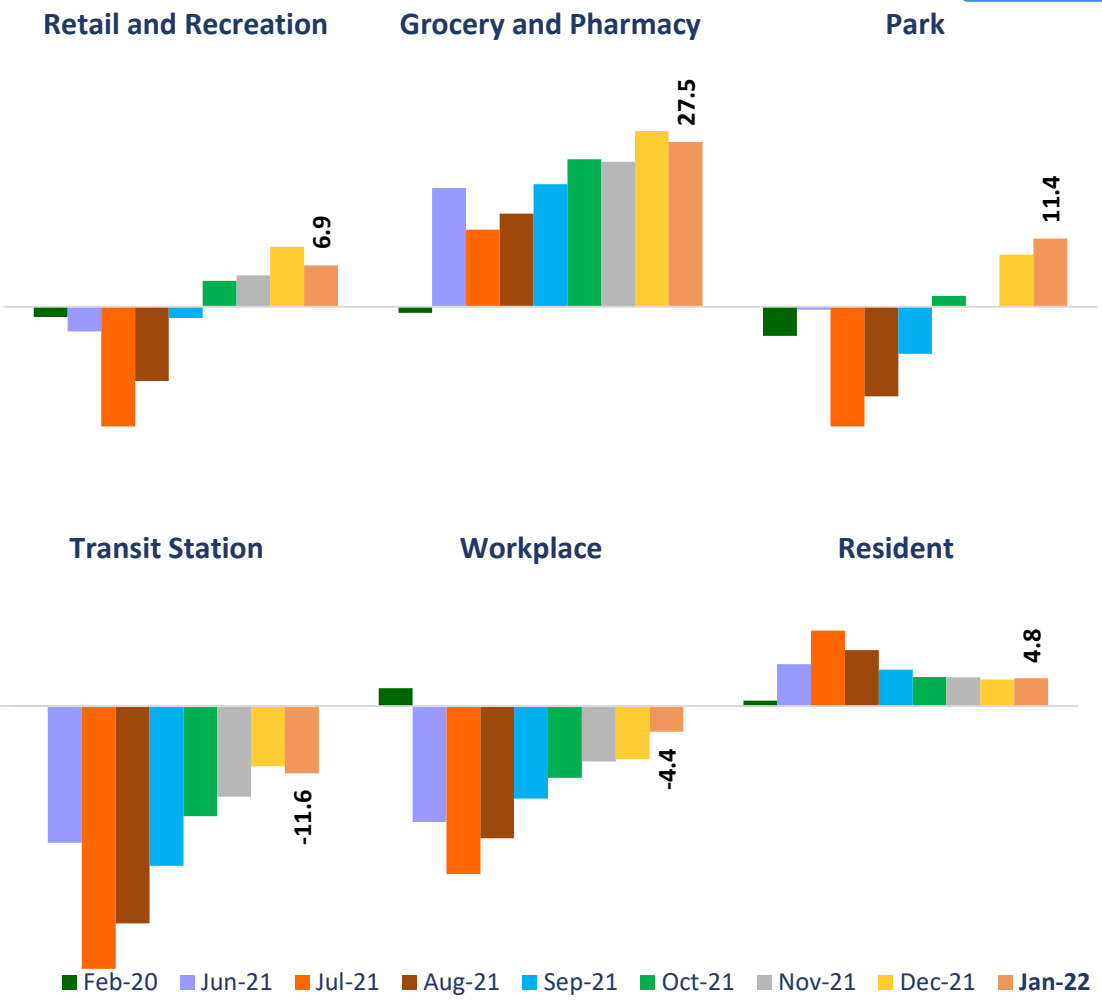
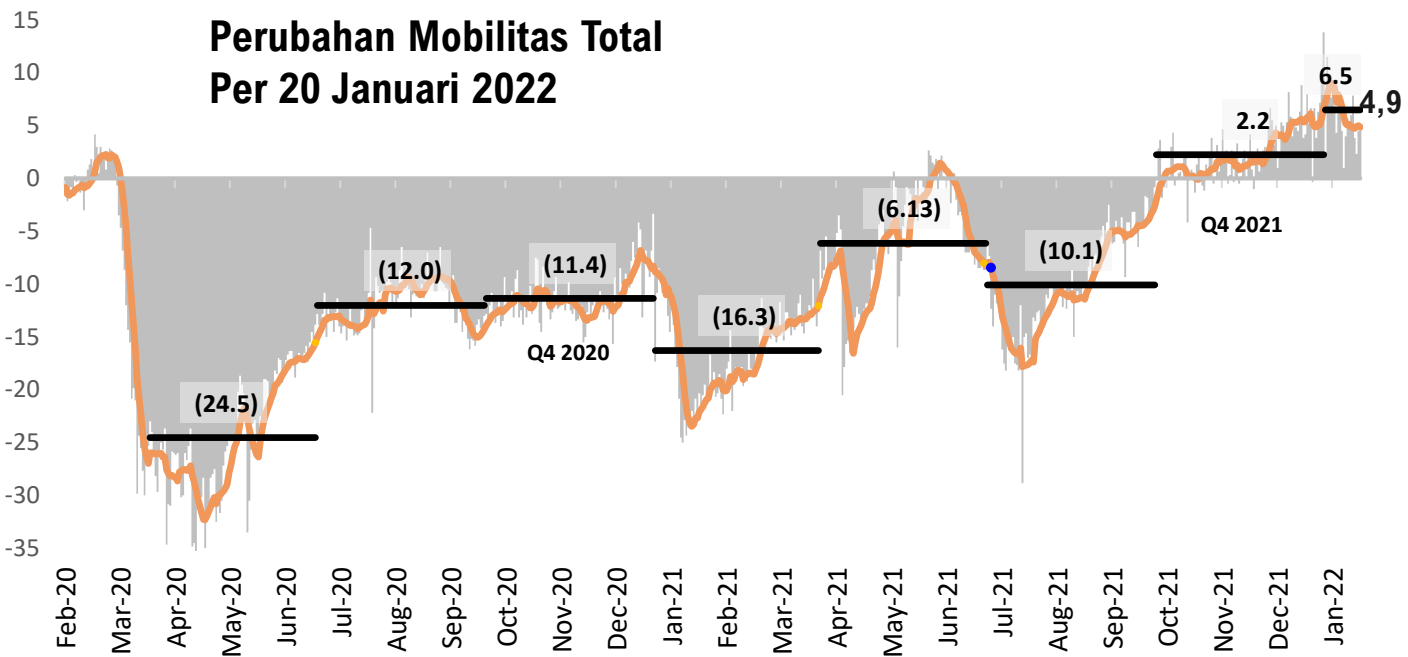
Miliar USD	Kumulatif	
	2021	2020
Total	35,34	21,62
Migas	-13,25	-6,01
Non Migas	48,59	27,63

Sumber: BPS



MOBILITAS MASYARAKAT SUDAH DI ATAS LEVEL PRA-PANDEMI

Meski relatif melambat kembali setelah mencapai puncaknya di minggu pertama Januari



Perubahan Mobilitas Bulanan (%mtm)

- Kuartal IV rata-rata mobilitas sudah positif 2,2% di atas level prapandemi dan berlanjut di awal 2022
- Mobilitas di berbagai lokasi terus meningkat signifikan, terutama di tempat belanja kebutuhan pokok (*retail-recreation & grocery-pharmacy*)
- Proses pemulihan masih perlu mengantisipasi situasi pandemi, pola mobilitas relatif melambat sejalan dengan kenaikan kasus positif Covid-19 dalam beberapa hari terakhir

Sumber: Google Mobility Index

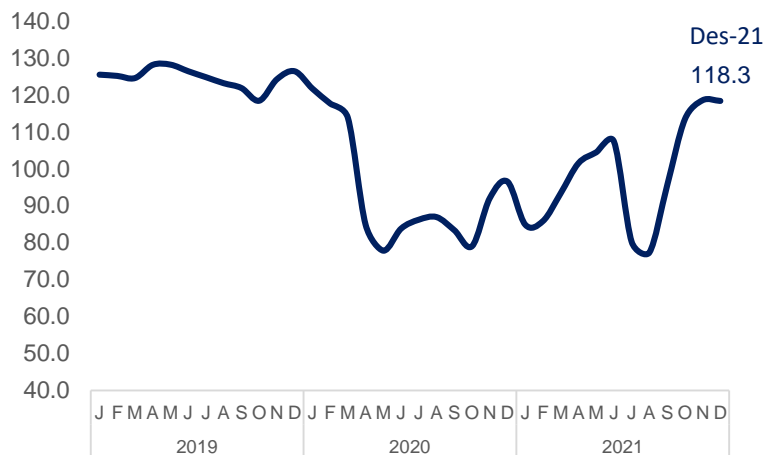


INDIKATOR KONSUMSI & PRODUKSI MENUNJUKKAN PENGUATAN

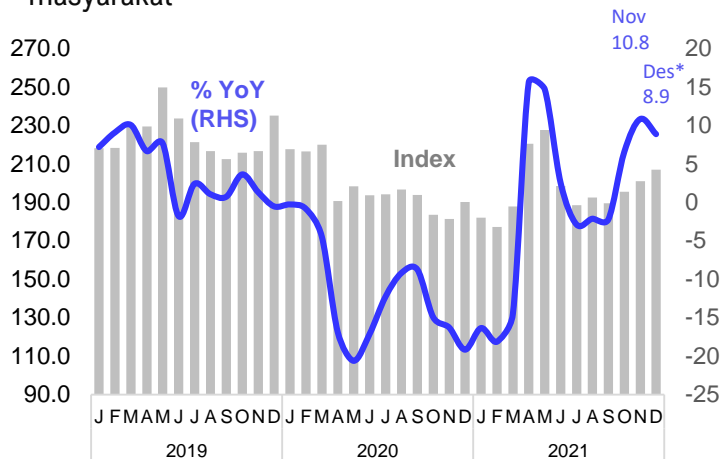
Seiring kondisi pandemi COVID-19 yang terkendali

KONSUMSI

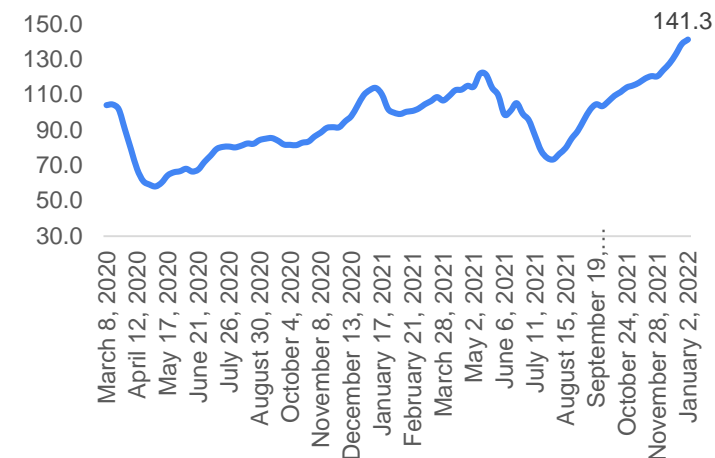
Consumer Confidence Index hingga Desember terus membaik seiring dengan relaksasi PPKM



Retail Sales Index diperkirakan terus menguat pada Desember seiring membaiknya mobilitas masyarakat

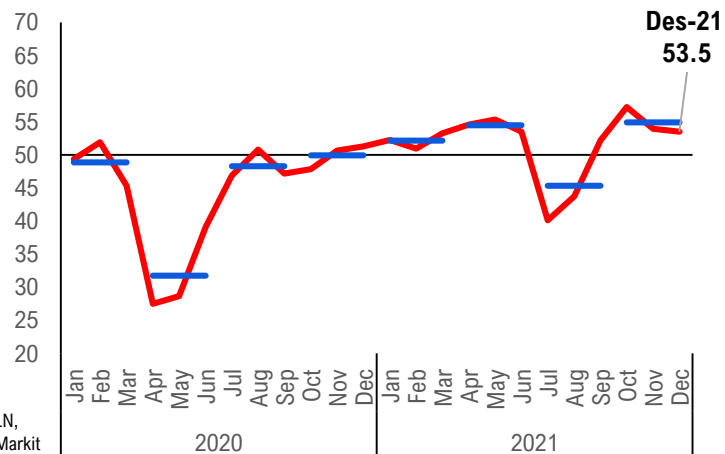


Mandiri Spending Index hingga 2 Januari 2022 terus naik, indikasi peningkatan konsumsi

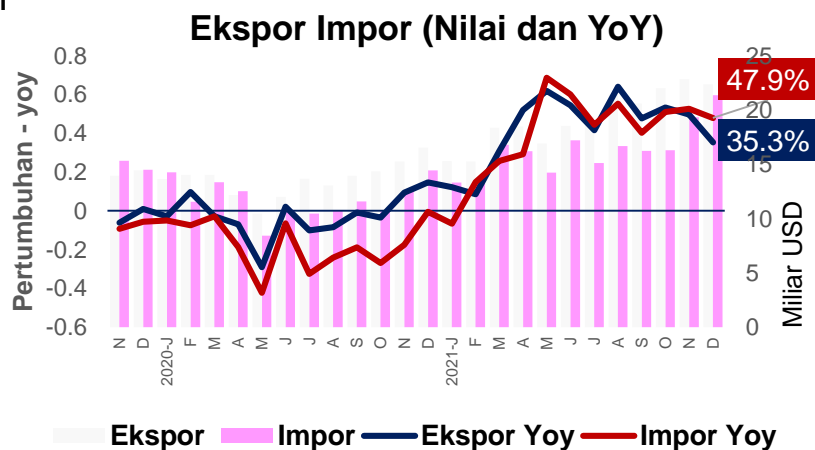


PRODUKSI

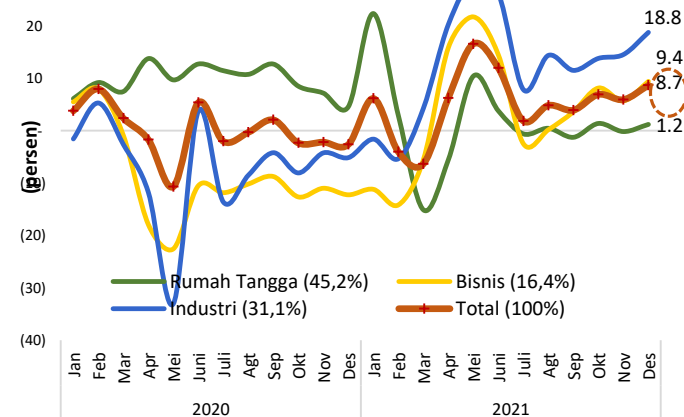
PMI Manufaktur Indonesia terus melanjutkan level ekspansi di sepanjang TW IV-21



Ekspor dan Impor tumbuh dua digit hingga Desember. Masih kuatnya permintaan dari negara mitra dagang di masa pemulihan ekonomi dunia



Pertumbuhan konsumsi Listrik melanjutkan tren positif di Desember, terutama Industri



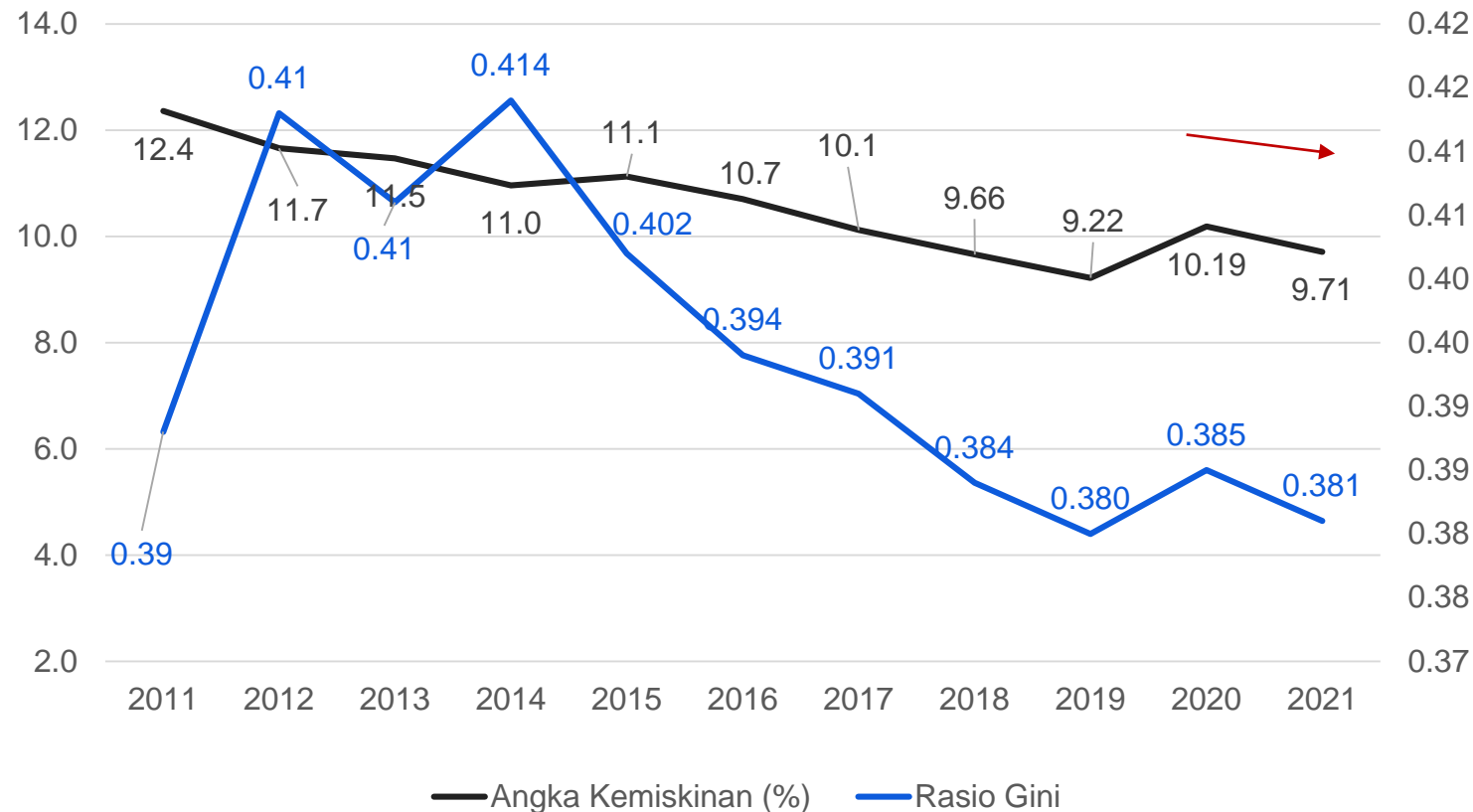
Sumber: Bank Indonesia, PLN, Mandiri Institute, BPS, IHS Markit



TINGKAT KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN KEMBALI BERHASIL DITURUNKAN DI 2021

Program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan dalam APBN efektif menurunkan tingkat kemiskinan

Perkembangan Kemiskinan dan Ketimpangan



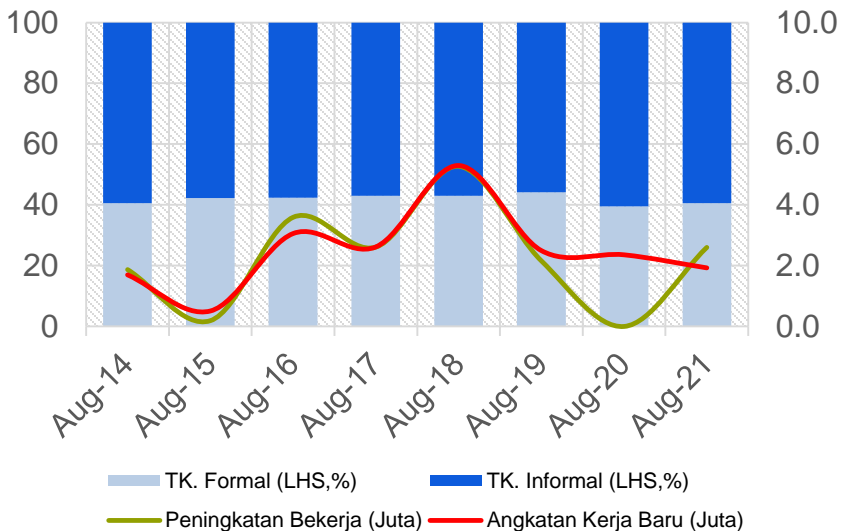
- Dalam satu dekade terakhir angka kemiskinan dan ketimpangan dalam tren menurun. Namun, **pandemi Covid-19 menghentikan tren penurunan kemiskinan dan ketimpangan** tersebut.
- Selama satu dekade tersebut, jumlah penduduk miskin **turun sebesar 4,78 juta** orang. Namun, kemudian dalam masa sekitar 2 tahun pandemi, jumlah Penduduk miskin **naik kembali sebesar 2,40 juta** orang.
- **Pemulihan ekonomi dan Program Perlinsos mampu menekan tingkat kemiskinan** menjadi 9,71% per September 2021 dari 10,19% per September 2020. **Tanpa perluasan Perlinsos, Bank Dunia memproyeksikan angka kemiskinan tahun 2021 dapat mencapai 11,4%.**
- Secara khusus, Pemerintah telah menetapkan **strategi jangka menengah (2021-2024) untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem** (USD 1,9 PPP/hari) sehingga kemiskinan ekstrem dapat dihapuskan **di tahun 2024**. Jumlah Penduduk miskin ekstrem tahun 2021 adalah 10,86 juta orang.



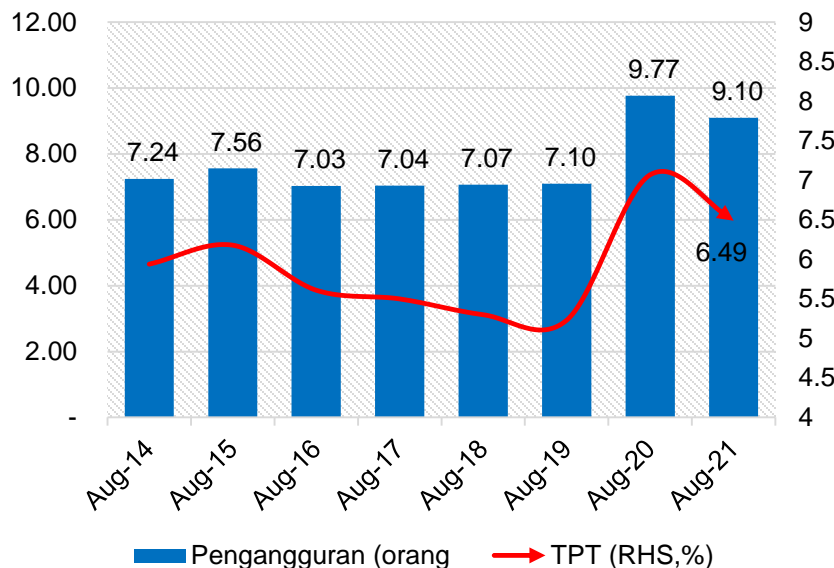
INDIKATOR PENGANGGURAN JUGA MEMBAIK

Penyerapan tenaga kerja sekitar 2,6 juta orang, pengangguran turun sekitar 0,67 juta orang

Perkembangan Pasar Tenaga Kerja



Jumlah Pengangguran & TPT



Sumber: BPS, diolah

- Jumlah pengangguran berkurang 0,67 juta orang, dan TPT menurun 0,58 persen poin.
- Penyerapan tenaga kerja meningkat 2,6 juta orang, sementara angkatan kerja meningkat sebesar 1,93 juta orang.
- Perlu kerja keras untuk mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja.

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Agustus 2021

6,49% (TPT)
9,10 Jt orang

Penurunan Agt 21 thd. Agt 20

0,58 p.p
0,67 jt orang

Pemulihan ekonomi telah menciptakan 2,6 juta lapangan kerja baru dalam kurun Agt 20 – Agt 21

PENDUDUK USIA KERJA

Agustus 2021

206,71 Jt orang
Tumbuh 1,34 % (yoy)

PENDUDUK BEKERJA

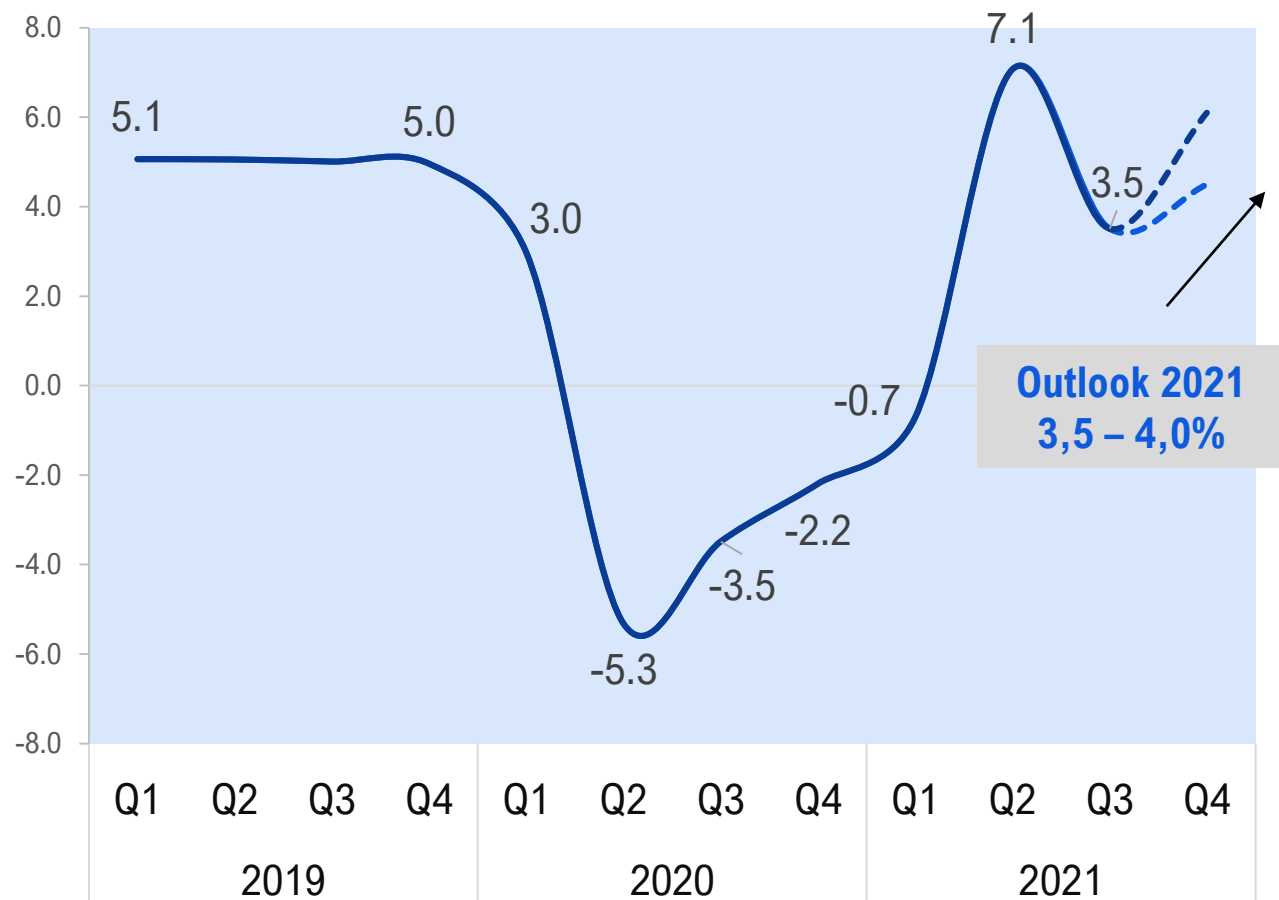
Agustus 2021

131,05 jt orang
Tumbuh 2,02 % (yoy)

Dalam 10 tahun terakhir penduduk usia kerja tumbuh 1,68%, sementara penduduk yg bekerja tumbuh lebih cepat, 1,76%.



MOMENTUM PEMULIHAN EKONOMI DOMESTIK TERUS MENGUAT



Sumber: BPS, estimasi Kementerian Keuangan

- **Kinerja ekonomi Q4 2021 diperkirakan tumbuh di atas 5,0%** didukung oleh menguatnya aktivitas konsumsi, investasi masih tingginya ekspor seiring terkendalinya kondisi pandemi Covid-19.
- **Konsumsi rumah tangga menguat**, termasuk kategori transportasi dan leisure yang tertahan akibat varian delta di Q3
- **Aktivitas investasi meningkat** seiring membaiknya supply chain dan penyelesaian proyek strategis nasional (PSN)
- **Ekspor dan Impor diperkirakan masih tumbuh tinggi hingga Q4 2021**, terutama kinerja ekspor non-migas
- **Selain risiko varian Omicron, risiko global juga meningkat**, terutama terkait percepatan *tapering-off* AS, meningkatnya *tekanan inflasi global*, serta *perlambatan ekonomi di China*

2

KINERJA APBN 2021





DINAMIKA KEBIJAKAN FISKAL DI MASA PANDEMI

Dibutuhkan konsistensi kebijakan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan keberlanjutan fiskal

2020



EXTRAORDINARY POLICY

IMMEDIATE RESPONSE:

- Perpu No.1/2020 □ UU No.2/2020
- Stimulus penanganan Covid-19 dan Program PEN, defisit APBN melebar 6,34% PDB

REOPENING POLICY

PEMBERIAN STIMULUS: REOPENING

Perluasan stimulus dan rekonstruksi program agar lebih simple dan implementatif sehingga dapat segera dieksekusi untuk pemulihan ekonomi

2021



RECOVERY & REFORM POLICY

MENDORONG RECOVERY & REFORMASI

- Fokus penanganan Pandemi (al.Vaksinasi, protokol kesehatan,
- *recovery* melalui PEN yang fleksibel dan akutabel
- Momentum reformasi (UU HPP,UU HKPD)

2022



RECOVERY & REFORM POLICY

AKSELERASI RECOVERY & REFORMASI

- Penguatan penanganan Pandemi (al akselerasi Vaksinasi mencapai kekebalan komunal)
- Mengakselerasi *recovery* (keberlanjutan PEN0
- Efektivitas reformasi

2023

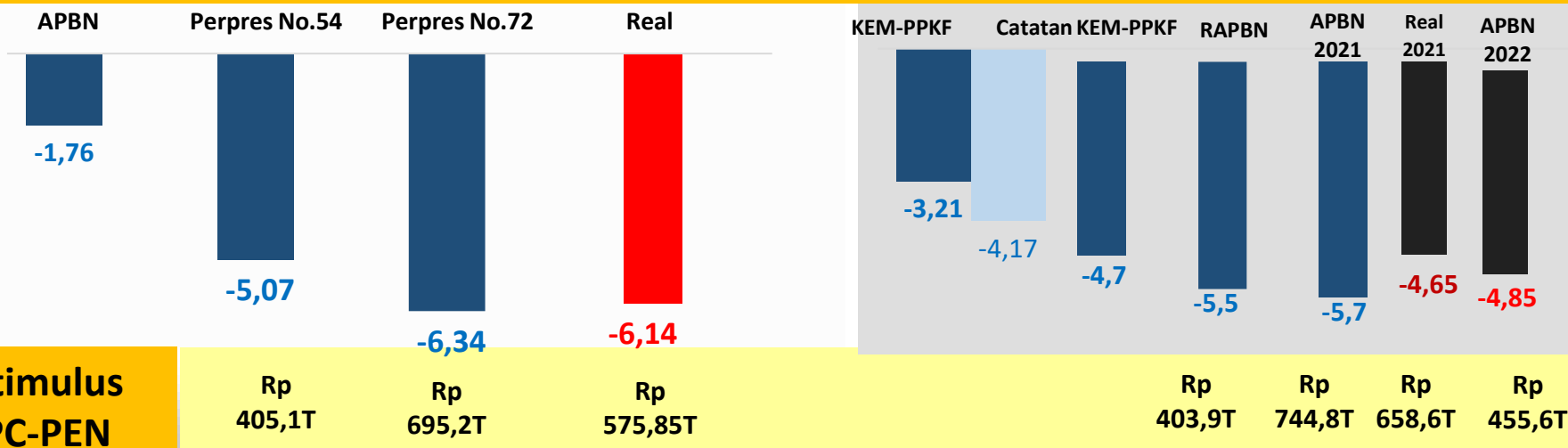


HIGH QUALITY FISCAL CONSOLIDATION

PENDISIPLINAN FISKAL UNTUK KEBERLANJUTAN JANGKA PANJANG

- Defisit kembali maksimal 3% PDB
- *Primary balance* menuju positif
- *Debt ratio* diupayakan menurun
- Risiko utang terkendali

Perkembangan Defisit pada Masa Pandemi COVID-19 (% PDB)



APBN bergerak sangat dinamis guna mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi



PELAKSANAAN APBN 2021 MENCATATKAN KINERJA POSITIF

Pendapatan Negara melebihi target, Belanja Negara optimal, Pembiayaan Anggaran yang lebih efisien sebagai basis kuat untuk konsolidasi fiskal



Uraian (triliun rupiah)	2019		2020		2021				
	LKPP	Growth (%)	LKPP	Growth (%)	APBN	Realisasi Sementara	Selisih thd APBN	% thd APBN	Growth (%)
A. PENDAPATAN NEGARA	1.960,6	0,9	1.647,8	(16,0)	1.743,6	2.003,1	259,4	114,9	21,6
a.l. I. Penerimaan Pajak	1.332,7	1,5	1.072,1	(19,6)	1.229,6	1.277,5	47,9	103,9	19,2
II. Kepabeanan & Cukai	213,5	3,9	213,0	(0,2)	215,0	269,0	54,0	125,1	26,3
III. PNBP	409,0	(0,1)	343,8	(15,9)	298,2	452,0	153,8	151,6	31,5
B. BELANJA NEGARA	2.309,3	4,3	2.595,5	12,4	2.750,0	2.786,8	36,7	101,3	7,4
I. BPP	1.496,3	2,8	1.833,0	22,5	1.954,5	2.001,1	46,5	102,4	9,2
1. Belanja K/L	873,4	3,2	1.059,6	21,3	1.032,0	1.189,1	157,1	115,2	12,2
2. Belanja Non K/L	622,9	2,3	773,3	24,2	922,6	812,0	(110,6)	88,0	5,0
a.l. Subsidi	201,8	(7,0)	196,2	(2,8)	175,4	243,1	67,7	138,6	23,9
II. TKDD	813,0	7,3	762,5	(6,2)	795,5	785,7	(9,8)	98,8	3,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(73,1)	536,4	(633,6)	766,4	(633,1)	(440,2)	192,9	69,5	(30,5)
D. SURPLUS/(DEFISIT)	(348,7)	29,4	(947,7)	171,8	(1.006,4)	(783,7)	222,7	77,9	(17,3)
% thd PDB	(2,20)	21,25	(6,14)		(5,70)	(4,65)			
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	402,1	31,5	1.193,3	196,8	1.006,4	868,6	(137,7)	86,3	(27,2)
a.l. I. Pembiayaan Utang	437,5	17,6	1.229,6	181,0	1.177,4	867,4	(310,0)	73,7	(29,5)
II. Pembiayaan Investasi	(49,4)	(19,2)	(104,7)	112,0	(184,5)	(142,5)	42,0	77,2	36,1
III. Pembiayaan Lainnya	15,2	8.902,5	70,9	367,3	15,8	144,4	128,7	916,7	103,6
SiLPA(SiKPA)	53,4		245,6			84,9			

Defisit APBN 4,65% PDB lebih rendah Rp222,7 T dari target APBN 2021:

- **Pendapatan Negara 114,9% target APBN (melebihi pra pandemi)**
 - Perpajakan di atas target → pemulihan ekonomi yang salah satunya didukung pemberian insentif untuk dunia usaha
 - Tren kenaikan harga komoditas mendorong kinerja penerimaan kepabeanan dan PNBP SDA
 - PNBP layanan K/L tumbuh positif sejalan dengan peningkatan aktifitas masyarakat
- **Belanja Negara optimal untuk mendukung penanganan covid dan menjaga trend penguatan pemulihan ekonomi**
 - Belanja K/L tumbuh positif dengan fokus untuk penanganan covid dan program perlintas
 - Belanja nonK/L a.l → Subsidi meningkat untuk menjaga daya beli masyarakat
 - TKDD mendukung daerah dalam penanganan covid dan pemulihan ekonomi
- **Pengendalian utang yang lebih solid:** Pembiayaan utang lebih rendah Rp310T dengan mengoptimalkan SKB III dan SAL, sedangkan pembiayaan investasi utamanya untuk mendukung infrastruktur
- **Pengelolaan kas lebih efisien:** SiLPA 2021 Rp84,9T dampak defisit yang lebih rendah dan pembiayaan anggaran yang lebih efisien



PROGRAM PC-PEN 2021 RESPONSIF UNTUK Mendukung Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Kebijakan fiskal bekerja keras untuk merespon merebaknya Delta Varian dan dampak sosial ekonominya

Alokasi awal

Rp699,43 T

- Kesehatan 176,3
- Perlinsos 157,4
- Program Prioritas 122,4
- Dukungan UMKM/Korp 184,8
- Insentif Usaha 58,5

Pemulihan Ekonomi dan Lanjutan Pelaksanaan Pandemi

- Vaksinasi, perawatan pasien
- Perlinsos peserta eksisting
- Mendukung pemulihan melalui program KL dan dukungan UMKM

Alokasi *updated* saat PPKM Darurat

Rp744,77 T

- Kesehatan 214,96
- Perlinsos 186,6
- Program Prioritas 117,9
- Dukungan UMKM/Korp 162,4
- Insentif Usaha 62,8

Respon peningkatan kasus harian untuk kesehatan dan perlindungan masyarakat

- **Percepatan** vaksinasi, **peningkatan** alokasi klaim pasien
- **Perluasan** Perlinsos
- Tetap melanjutkan pemulihan ekonomi dan dukungan dunia usaha

Realisasi Sementara

Rp658,6 T (88,4%)

Telah menampung respon atas dinamisasi pandemi covid 19

- **Tambahan klaim pasien** dan insentif nakes
- Dukungan untuk **penanganan kemiskinan ekstrem**
- Dukungan untuk perlindungan kepada masyarakat a.l. program **jaminan kehilangan pekerjaan**



Pemanfaatan Insentif Pajak Tahun 2021 mencapai Rp68,32 T

Sepanjang tahun 2021, pemanfaatan insentif pajak sangat baik, mencapai 112,6% dari target.
Realisasi tersebut lebih tinggi dari tahun 2020 yang mencapai 50,47% dari target.

Insentif Dunia Usaha (PMK-9) yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp62,72 triliun

Insentif untuk meningkatkan daya beli masyarakat



106.118 Pemberi Kerja
Rp5,23 T

Insentif untuk membantu likuiditas dan kelangsungan usaha



9.747 WP
Rp17,87 T



58.307 WP
Rp26,89 T



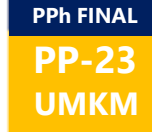
2.857 WP
Rp6,13 T

Insentif penurunan tarif PPh Badan yang berlaku umum



Seluruh WP Badan
Rp5,79 T

Insentif untuk membantu UMKM



138.635 UMKM
Rp0,80 T

Insentif PMK-21 (PPN DTP Rumah) yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp0,79 triliun

Meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung sektor dengan output multiplier yang tinggi



941 Pengembang
Rp0,79 T

Insentif PMK-31 (PPnBM DTP Kendaraan Bermotor) yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp4,63 triliun

Meningkatkan utilitas kapasitas produksi otomotif dan sebagai instrumen pengungkit konsumsi



6 Pabrikan Kendaraan Bermotor
Rp4,63 T

Insentif PMK-102 (PPN DTP Sewa Outlet Ritel) yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp0,18 triliun

Mengurangi beban sektor ritel yang sangat terdampak oleh PPKM



893 Pedagang Ritel
Rp0,18 T

Catatan: Tidak termasuk Insentif BM DTP

DJP secara berkala melakukan validasi data atas permohonan dan laporan WP sehingga data pemohon dan realisasi dapat berubah (naik ataupun turun) dari waktu ke waktu



PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK TAHUN 2020

Pada tahun 2020 insentif fiskal telah membantu menjaga ketahanan usaha WP



Insentif Pajak telah dimanfaatkan dan membantu 464.380 WP

Insentif untuk meningkatkan daya beli masyarakat



131.889 Pemberi Kerja
1,97 juta Pegawai
Rp3,47 T

Insentif untuk membantu likuiditas dan kelangsungan usaha



14.941 WP
Rp13,56 T



66.682 WP
Rp20,56 T



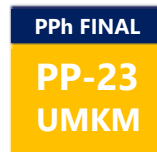
2.593 WP
Rp7,57 T

Insentif penurunan tarif PPh Badan yang berlaku umum



Seluruh WP Badan
Rp12,68 T

Insentif untuk membantu UMKM



248.275 UMKM
Rp0,78 T

Mayoritas KLU (KLBI) *Eligible* telah memanfaatkan insentif

- PPh 21 DTP **90%**
- Pengurangan Angsuran PPh 25 **86%**
- Pembebasan PPh 22 Impor **72%**
- Restitusi PPN Dipercepat **43%**

3

BELANJA PERPAJAKAN





Estimasi Belanja Perpajakan 2020



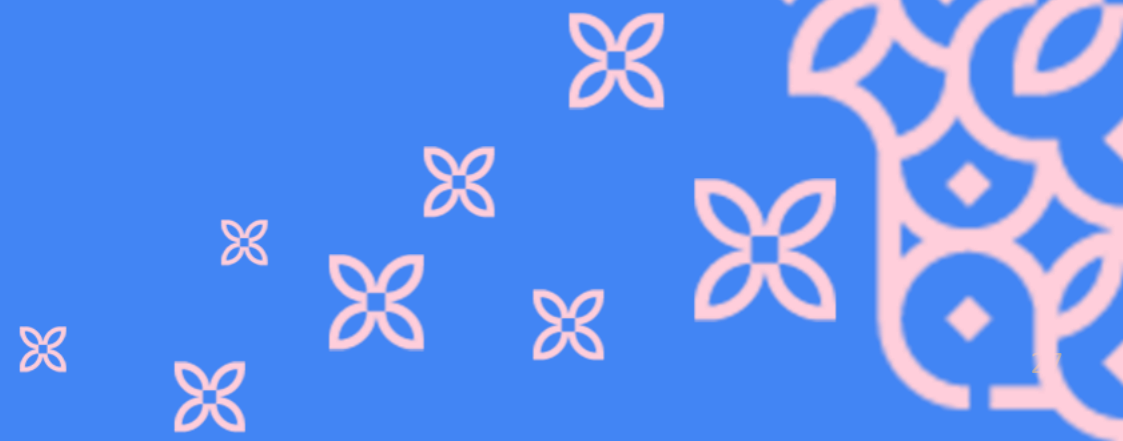
Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak

Jenis Pajak	Estimasi			
	2017	2018	2019	2020
PPN & PPnBM	127,9	150,5	156,5	140,4
PPh	92,4	99,9	104,3	80,6
Bea Masuk dan Cukai	8,8	12,3	11,3	13,7
PBB sektor P3	0,1	0,1	0,1	0,1
Bea Materai	-	-	-	-
Total	229,1	262,8	272,1	234,8

- Estimasi belanja perpajakan tahun 2020 mencapai Rp234,8 triliun atau sekitar 1,52 persen PDB, turun sekitar 13,7 persen dari tahun 2019. Penurunan disebabkan antara lain karena kontraksi aktivitas ekonomi serta perubahan *benchmark* tarif PPh Badan dari
- Mayoritas belanja perpajakan berdasarkan jenis pajak adalah PPN dan PPnBM (59,8%), dan diterima oleh sektor industri pengolahan (24,3%)
- Penyempurnaan basis data dalam perhitungan belanja perpajakan PPN dan PPnBM menyebabkan adanya penyesuaian besaran belanja perpajakan tahun 2019 dan sebelumnya

4

POKOK POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2022





ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2022 “PEMULIHAN EKONOMI & REFORMASI STRUKTURAL”



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Akselerasi penanganan COVID-19: Penguatan sektor Kesehatan sebagai kunci *recovery* ekonomi al.:

1. Vaksinasi mencapai kekebalan komunal;
2. Prokes;
3. Faskes (al. RS Darurat), Nakes;
4. Obat-obatan

Menjaga *resilience*, *survival* dan akselerasi *recovery* melalui program Perlinsos, dukungan kepada dunia usaha dan UMKM al.:

1. PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, BLT DD;
2. Subsidi bunga KUR dan insentif dunia usaha.

Momentum reformasi struktural untuk peningkatan daya saing, kapasitas produksi melalui:

1. SDM Unggul dan berintegritas (Pendidikan);
2. Sistem Kesehatan yang handal (*health security preparedness*)
3. Perlinsos yang adaptif;
4. Infrastruktur pendukung tranformasi ekonomi;
5. Reformasi institusional.

Reformasi Fiskal yang komperhensif:

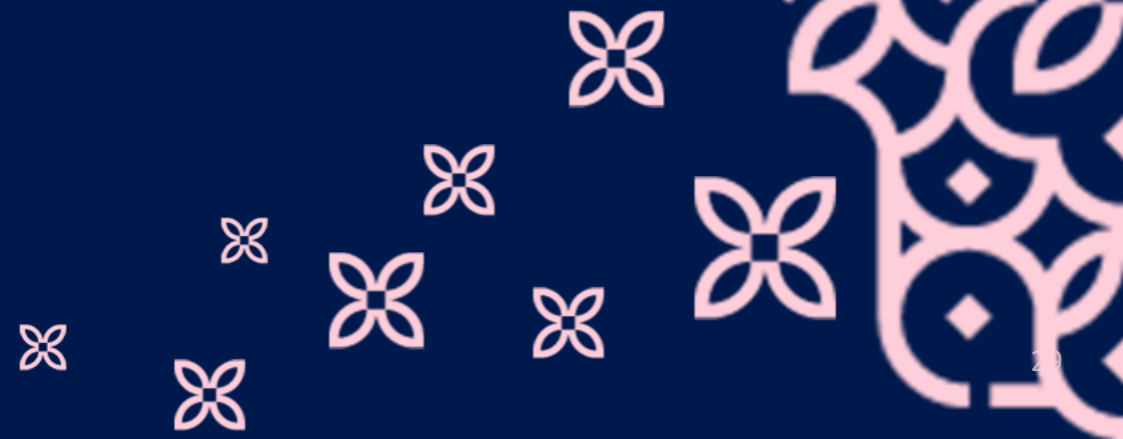
1. Reformasi perpajakan;
2. *Spending better* (*Zero based budgeting*), cadangan untuk antisipasi dan automatic stabilizer *uncertainty*;
3. Inovasi pembiayaan (al. KPBU, SWF, SMV), serta Pengendalian utang,

Menjaga pelaksanaan APBN 2022 berjalan optimal sebagai fondasi konsolidasi fiskal di tahun 2023:

1. Reformasi struktural harus optimal;
2. Reformasi fiskal harus berhasil;
3. Menjadi komitmen bersama seluruh K/L

4

Strategi dan *Outlook* Perpajakan 2022





MENDORONG SISTEM PERPAJAKAN ADIL, SEHAT, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL



Pajak tidak menciptakan distorsi yang berlebihan dalam perekonomian



Mampu beradaptasi dengan perubahan struktur, teknologi dan aktivitas dunia usaha

Biaya untuk patuh pajak (*compliance cost*) dan memungut pajak seminimal mungkin

Sistem perpajakan harus efektif sebagai instrumen kebijakan dan mampu menciptakan keadilan

Penerimaan perpajakan harus memadai, terjaga, dan terus berkelanjutan

Administrasi perpajakan yang mudah, *simple* dan menjamin kepastian hukum

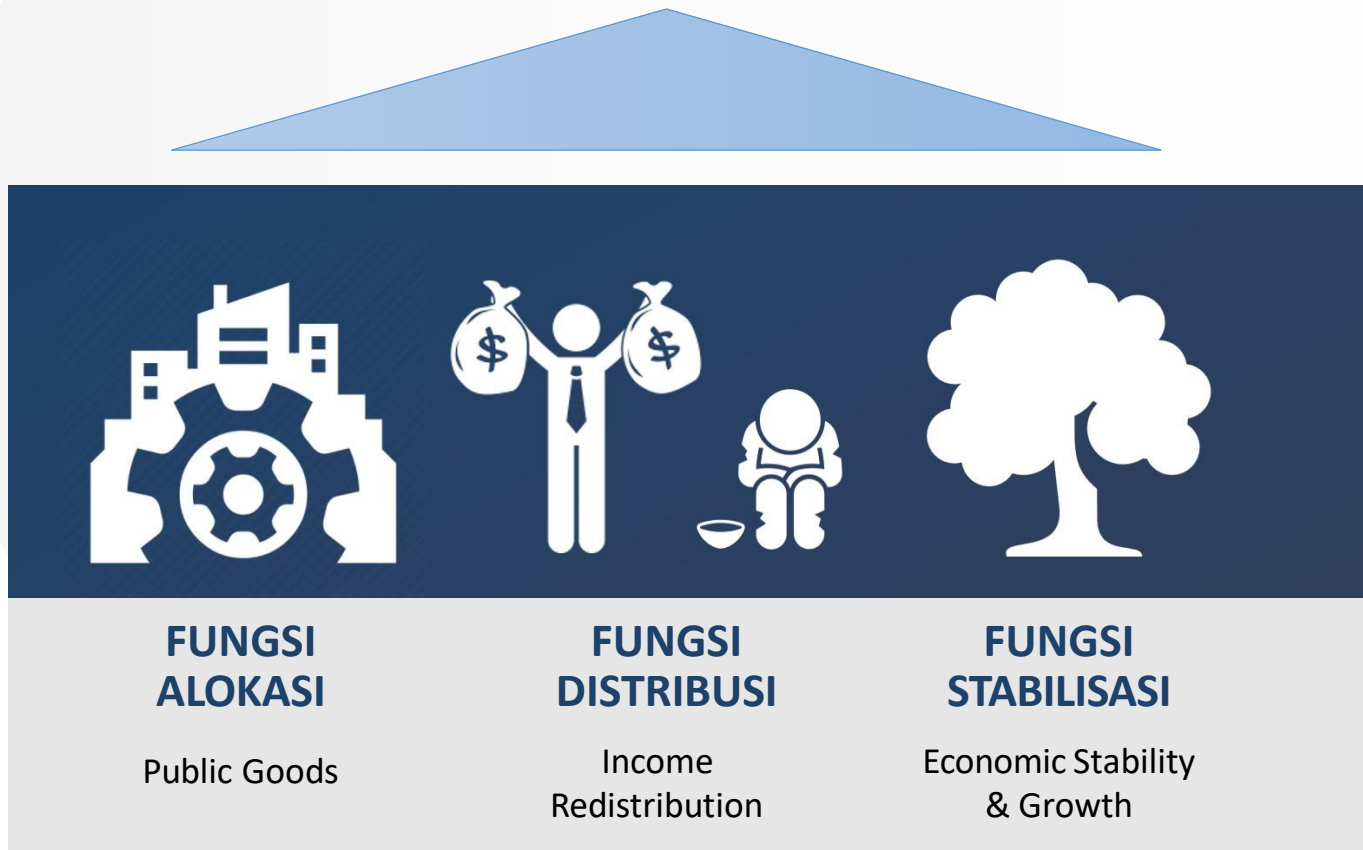


REFORMASI PERPAJAKAN MEMPERKUAT FUNGSI APBN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

APBN sebagai instrumen untuk mewujudkan
masyarakat adil dan makmur



- Dalam 10 tahun terakhir, pendapatan negara cenderung turun sekitar 10% PDB → kapasitas fiskal terbatas untuk pengeluaran negara
- Dalam kondisi krisis, APBN sebagai *countercyclical* - fungsi distribusi dan stabilisasi lebih prioritas untuk *survival* dan *recovery* ekonomi. Fungsi alokasi dilakukan rasionalisasi dengan *spending better*.
- Reformasi fiskal dan reformasi struktural dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian dan menjaga sustainabilitas fiskal jangka panjang



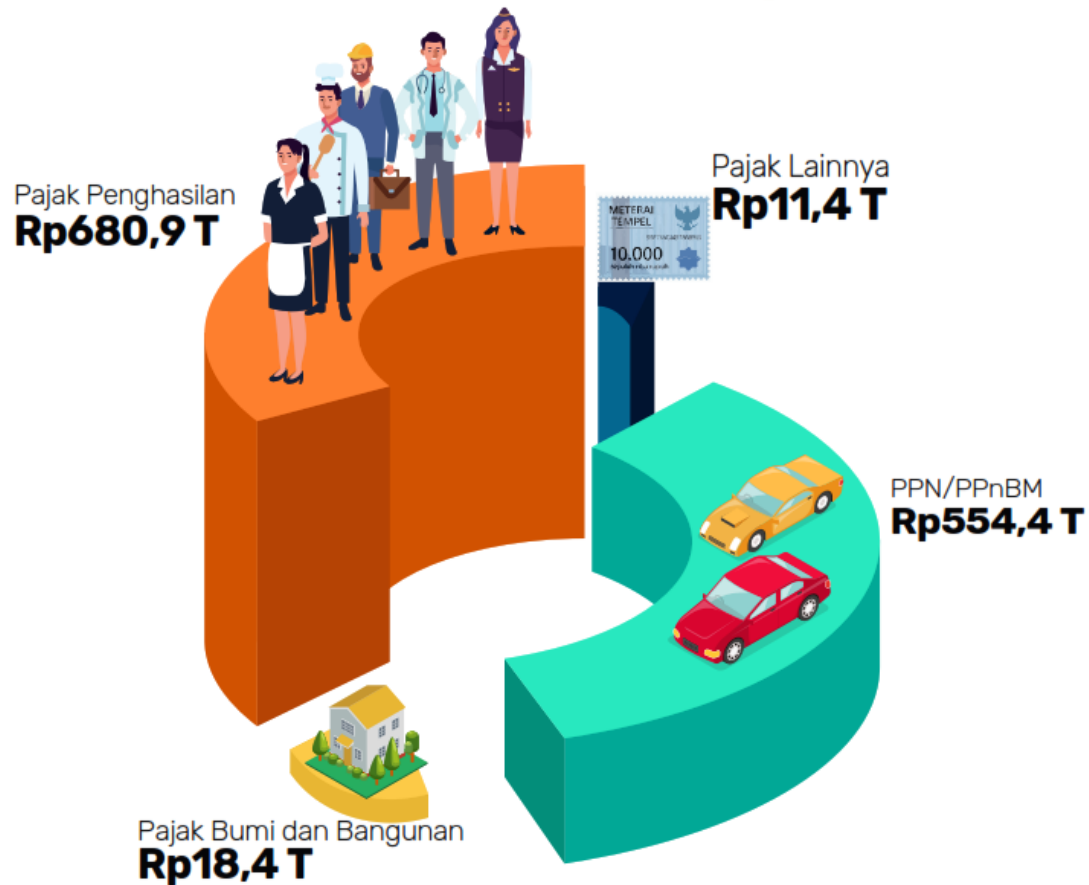


TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi

Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak Tahun 2022 **Rp1.265,0 T**



Strategi

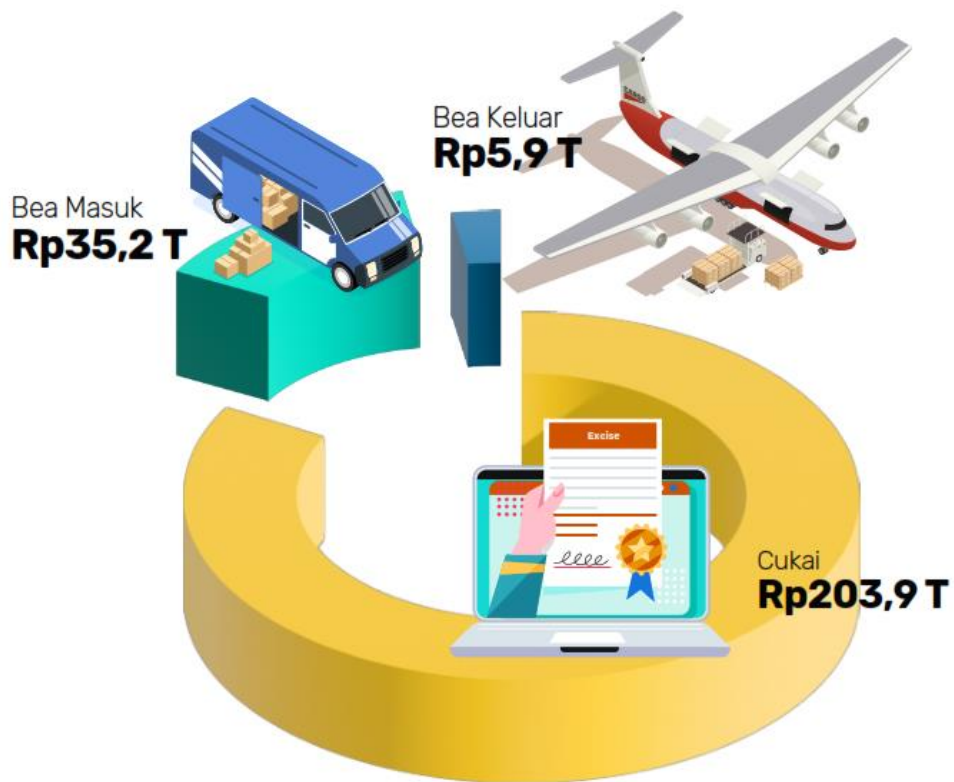
1. Perluasan basis pemajakan dengan peningkatan kepatuhan melalui kegiatan edukasi dan peningkatan pelayanan perpajakan;
2. Inovasi penggalan potensi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha;
3. Perluasan kanal pembayaran pajak;
4. Penegakan hukum yang berkeadilan dan mendorong kepatuhan WP.
5. Melanjutkan proses reformasi perpajakan (organisasi, SDM, proses bisnis, data dan IT, serta regulasi)
6. Pemberian insentif fiskal secara terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai *multiplier* yang kuat



TARGET PENERIMAAN KEPABEANAN & CUKAI DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Kepabeanan dan Cukai

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2022 **Rp245,0 T**



Strategi

1. Mendukung pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan antara lain melalui optimalisasi fasilitas Kawasan Khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah.
2. Meningkatkan perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan berkontribusi, antara lain melalui (i) Pengembangan sistem pengawasan melalui pemanfaatan *Artificial Intelligence* dan *Smart Customs and Excise System*; dan (ii) Peningkatan kinerja logistik melalui pengembangan *National Logistic Ecosystems*.
3. Meningkatkan penerimaan negara yang optimal, antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kepabeanan dan cukai (perluasan basis penerimaan)



UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (HPP)

Bagian reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan dan mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan

1. KUP

- a. NPWP menggunakan NIK
- b. Penunjukkan pihak lain sebagai pemotong, pemungut, penyeter dan/atau pelapor pajak (termasuk *e-commerce*)
- c. Penyesuaian besaran sanksi

2. PPh

- a. Penyesuaian layer PPh OP
- b. PPh Badan tahun 2022 tetap 22%
- c. Tarif PPh 0,5% untuk UMKM-OP (*threshold* Rp500 juta)
- d. Natura menjadi obyek pajak

3. PPN

- a. Tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% (1 April 2022) dan paling lama tahun 2025 menjadi 12%
- b. Non BKP dan non JKP pindah menjadi BKP/JKP dibebaskan.

4. Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak

Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela.

5. Pajak Karbon

Penerapan pajak karbon mulai 1 April 2022 terbatas untuk badan yang bergerak di bidang PLTU Batubara dengan tarif Rp30,00/kg CO₂e

6. Cukai

Penguatan mekanisme penetapan barang kena cukai; dan Penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam tindak pidana di bidang cukai atas pelanggaran perizinan

Terima Kasih

